

EDISI 44 / 2018

EDUKASI

K E U A N G A N

LEBIH DARI DIKLAT

*Tinggal landas tinggalkan stereotip pelatihan
melalui diversifikasi ragam pembelajaran
yang mengedepankan tujuan organisasi*



Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI

Sugeng Satoto

SEKRETARIAT

Abdul Aziz Maghfur

Dodi Septariza

Naseh Iskandar

Eko Supriyono

Fitria Sri Wulandari

REDAKTUR

Khalimi

Andi Manaek

Soderi

Eko Prasetyo

Tri Wibowo

Muhammad Irfan

Rio Suareski

Agus Hekso Pramudijono

Hartono

Agung Darono

Sintawati

Kurniawan

Inwan Hadiansyah

Agus Sunarya

R. Adhi Sutanto

Eduard Tambunan

Pilar Wirotama

EDITOR

Sudrajat

Ari Sandi Robert

Retyan Laksita Mutiary

Ardes Martua Sitanggang

Yohana Tolla

Imam Asma Nur Alam Marbun

Ridwan Sidik Kurniawan

Bima Lingga Sakti

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER

Muhammad Fath Kathin

Victorianus M. I. Bimo Adi

Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.

Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id.

Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7204131

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	14
PROFIL	22
SERAMBI ILMU	28
INFOGRAFIS	42
TAHUKAH KAMU	43
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	45
CERITA ALUMNI	48
MATA AIR	52
TIPS & TRIK	54
KESEHATAN	56
<i>POINT OF INTEREST</i>	58
GALERI	60
RESENSI	63
KANG EDU	64

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Apakah Anda Seorang

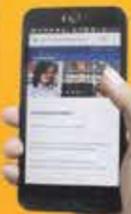
- KPA
- PPK
- Bendahara
- Pejabat Pengadaan
- Pengelola Keuangan lainnya?

Akses Terbuka untuk Umum

Tips
dan solusi
permasalahannya
kini ada di
genggaman
Anda



klc.kemenkeu.go.id/category/perbendaharaan
klc.kemenkeu.go.id/category/anggaran



SALAM REDAKSI

Tahun baru identik dengan semangat baru dan harapan baru. Setidaknya itu yang kami rasakan di tim redaksi Majalah Edukasi Keuangan. Di tahun 2018 ini kami bersemangat untuk meningkatkan kualitas majalah Edukasi Keuangan supaya dapat memberikan nilai lebih untuk anda para pembaca. Dimulai dari desain *layout* baru yang lebih sederhana dan minimalis, yang kami harap akan membuat anda lebih nyaman saat membaca majalah kami. Tak hanya itu, artikel dan rubrikasi pun kami tambah. Salah satunya adalah rubrik Cerita Alumni yang berisikan cerita inspiratif yang ditulis langsung oleh para alumni beasiswa yang dikelola oleh BPPK. Bagi anda yang tertarik mendaftar beasiswa, jangan lewatkan rubrik ini. Selain

itu kami juga menghimpun berbagai pandangan menarik dari penjurur wilayah kerja Balai Diklat Keuangan di rubrik Galeri. Ke depan, anda dapat melihat pandangan indah lainnya dari BDK-BDK kami. Berbicara tentang hal yang baru, BPPK melalui strategi Kemenkeu *Corporate University* telah mengembangkan berbagai metode pembelajaran baru. Dengan metode-metode ini, BPPK lebih dari sekedar menyelenggarakan diklat, atau kalau di istilah jaman sekarang #LebihDariDiklat. Simak variasi metode pembelajaran baru apa saja yang telah dikembangkan oleh BPPK dalam rubrik Liputan Utama. Selain itu, rubrik-rubrik lain khas Edukasi Keuangan juga sudah kami siapkan untuk anda. Selamat membaca!



OPEN CLASS PROF. MIKE OPAT

Pada tanggal 31 Januari 2018, Mike Opat membawakan kuliah umum tentang gambaran pemerintahan di Minnesota, Amerika Serikat. Mike Opat adalah pejabat pemerintah di Distrik Hennepin, Minnesota. Penerimaan pajak di Hennepin mencapai 99 persen karena kesadaran masyarakatnya.



PERESMIAN REHABILITASI PENDOPO

Kepala BPPK meresmikan Rehabilitasi Pendopo Muljatno Sindhudarmoko di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang pada tanggal 9 Februari 2018 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Zona Integritas BPPK.



PELANTIKAN PEJABAT

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kembali melantik pejabat struktural dan fungsional pada hari Selasa, 6 Februari 2018. Pada acara yang diadakan di Aula lantai 5 Gedung B Sekretariat BPPK siang itu, sebanyak 6 Pegawai melakukan sumpah jabatan dihadapan para pejabat di lingkungan BPPK.



PKN STAN GOES TO VILLAGES

Berlangsung upacara pelepasan rombongan "PKN STAN Goes to Villages 2018" di lapangan A Kampus PKN STAN. Program ini melibatkan 1.674 mahasiswa beserta dosen lintas jurusan yang akan berkarya ke 230 desa di Jawa Barat dan Banten.



#LebihdariDiklat



Inovasi

telah lama dikenal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. OECD menyebut kalau inovasi merupakan penyebab lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi dunia. Pembangunan kapasitas inovasi juga telah memainkan peran sentral dalam dinamika pertumbuhan negara-negara berkembang yang berhasil. Semakin inovatif suatu negara, maka semakin kompetitif dan giat negara itu.

Dalam sebuah tatanan organisasi, peran inovasi juga menjadi penting karena berinovasi merupakan ajang untuk menempekan mental organisasi menjadi lebih kuat, melepaskan diri dari kekakuan aturan, membentuk kerja sama tim, serta memberi kesempatan untuk memandang suatu hal dari sudut pandang yang berbeda (Carroll, 2016). Hal inilah yang juga membuat para pimpinan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkali-kali menyematkan pesan kepada seluruh pegawainya agar terus berinovasi di berbagai kesempatan. Bentuk inovasi BPPK sebagai organisasi, salah satunya terintegrasi dengan diterapkannya strategi Kemenkeu *Corporate University*. Di tahun 2018 ini, BPPK berkomitmen untuk memberikan #lebihdaridiklat.

Sejak tahun 2015, BPPK telah mulai serius berbenah, bertransformasi menjadi Kementerian Keuangan *Corporate University* (Kemenkeu *Corpu*). Perbaikan terjadi di segala aspek, mulai dari segi kediklatan sampai ke infrastruktur untuk menyiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal

antara pegawai yang lebih berpengalaman dengan pegawai yang lain. Bentuk dari *on the job training* beragam, seperti *coaching*, *mentoring*, magang, dan sebagainya. Jenis pengembangan yang kedua adalah *off the job training*, dimana kegiatan ini merupakan pelatihan yang dilakukan secara terpisah dari tempat kerja dan di luar jam kerja. Kegiatan pelatihan bisa dilakukan secara klasikal maupun menggunakan bantuan teknologi, seperti *e-learning*.

Secara sederhana, *Corpu* bisa diartikan sebagai strategi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara terintegrasi dengan pencapaian tujuan organisasi. *Corpu* bertanggung jawab dalam pengembangan SDM serta peningkatan kapabilitas dan daya saing organisasi, sehingga diharapkan mampu untuk memastikan bahwa ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan dan sejalan dengan target organisasi. Di tahun 2017, Kemenkeu *Corpu* telah berhasil meraih beberapa pencapaian di berbagai aspek, baik dari sisi kebijakan, kediklatan, dan infrastruktur. Dari sisi kebijakan, BPPK telah menyusun beberapa pedoman terkait seperti pedoman desain pembelajaran yang mengatur tentang penyusunan dan

(KLC), yang merupakan portal pembelajaran daring tentang keuangan negara yang bisa diakses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Untuk pembelajaran klasikal, BPPK mulai menginisiasi pengembangan kelas pintar atau *smart classroom* di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Penerapan strategi pembelajaran baru di BPPK mendapat sambutan yang cukup antusias dari *stakeholders*. Di tahun 2018, frekuensi penyelenggaraan program pembelajaran dengan berbagai metode tersebut akan lebih tinggi seiring dengan meningkatnya variasi dan jumlah program yang dikembangkan oleh Pusdiklat dalam rangka implementasi *Corpu*. Hal ini sejalan dengan adanya IKU Persentase Konversi Kurikulum Pelatihan ke dalam *Instructional System Design* (ISD), IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerja (Evaluasi Level 4 Kirkpatrick) serta IKU terkait utilisasi KLC. Peraturan Kepala BPPK nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kemenkeu juga membuka kesempatan untuk pengembangan dan inovasi metode pembelajaran baru yang akan dinisiasi di tahun 2018 seperti *gamification*, *micro learning*

Secara sederhana, Corpu bisa diartikan sebagai strategi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara terintegrasi dengan pencapaian tujuan organisasi.

pengelolaan keuangan dan kekayaan negara karena SDM merupakan salah satu aset yang paling penting dalam organisasi. Dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang baik, kualitas sumber daya dapat terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi organisasi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Beberapa ahli membagi dua bentuk pendekatan pengembangan sumber daya manusia, yaitu melalui *on the job training* dan *off the job training*. *On the job training* adalah salah satu cara mengembangkan sumber daya manusia yang dilakukan secara informal, dimana kunci dari kegiatan ini adalah transfer pengetahuan

penyempurnaan kurikulum, mekanisme evaluasi pembelajaran, menetapkan standar kompetensi teknis manajemen kediklatan, dan pedoman standar ruang kelas pintar.

Dari sisi kediklatan, di tahun 2017 BPPK telah menginisiasi penerapan metode pembelajaran baru, diantaranya *blended learning*, *video micro teaching*, dan *action learning*. Selain itu, BPPK juga sudah memulai kegiatan *open class*, dimana dalam kegiatan tersebut semua isu terhangat terkait pengelolaan keuangan negara dapat dibahas. Kegiatan ini juga mengakomodasi peserta di luar Kemenkeu dan dilaksanakan di luar jam kerja serta tanpa pungutan biaya apapun. Dari sisi infrastruktur, BPPK mengembangkan Kemenkeu *Learning Center*

dan *Massive Open Online Course* (MOOC).

Banyak hal telah disiapkan dan dikembangkan oleh BPPK untuk mengakomodasi upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kementerian Keuangan. Kepala BPPK mengharapkan agar upaya tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Harapannya ke depan, BPPK tidak hanya dikenal sebagai tempat diklat, tetapi bisa menjadi solusi dan tempat untuk berdiskusi terkait pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Singkatnya, BPPK #lebihdaridiklat.

FITRIA SRI WULANDARI

Kemenkeu Corpu:

Mengubah Sistem, Mengubah Fokus, dan Mengubah Mindset

The kind of learning that will define the twenty-first century is not taking place in a classroom, at least not in today classroom (Thomas and Brown, 2011).

Hal ini juga disadari oleh BPPK yang menilai pembelajaran klasikal di dalam kelas saja sudah tidak memadai untuk menunjang sebuah pembelajaran yang efektif. Pembaruan sistem pembelajaran sedikit demi sedikit mulai dilakukan BPPK dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* dan menjawab tantangan perubahan zaman. Hal ini perlu dilakukan oleh BPPK yang merupakan penggerak dari Kemenkeu Corpu dengan merancang program pembelajaran yang lebih komprehensif melalui integrasi model pembelajaran 10:20:70 dan menggunakan evaluasi sampai dengan level IV (Kirkpatrick).

Model pembelajaran 10:20:70 dalam pelatihan merupakan model yang banyak digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Model pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada perubahan perilaku yang berdampak pada kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Model pembelajaran ini dikembangkan pertama kali oleh Michael M. Lombardo and Robert W. Eichinger dalam bukunya *The Career Architect Development Planner* (1996) yang membagi dalam tiga pendekatan, yaitu 10% *education* (pendidikan formal), 20% *social learning*, dan 70% *experiential learning*.

Aspek yang pertama adalah pembelajaran formal, yaitu kegiatan pembelajaran yang didesain secara formal, seperti seminar, pelatihan, maupun ceramah, baik secara tatap muka maupun *online* yang dilakukan di awal

untuk memberikan gambaran utuh mengenai kerangka kerja pembelajaran. Pembelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan landasan secara teori tentang kompetensi yang akan dikuasai. Tahapan kedua adalah *social learning*, yang mengambil porsi 20%. Secara sederhana, pendekatan ini dapat diartikan dengan belajar dari orang lain. Bentuknya bisa berupa komunitas praktisi, konseling, *mentoring*, atau *coaching* yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pekerjaan. Dengan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang sejalan dengan tema pembelajaran, maka peserta akan terkondisi dengan isu-isu, kebiasaan, cara berpikir, serta berperilaku yang sesuai dengan apa yang sedang ia pelajari. Pendekatan terakhir adalah *experiential learning*, yang mengambil porsi 70%. Pendekatan dengan porsi terbesar ini melibatkan pengalaman praktis dan dapat dilakukan dengan memberikan penugasan yang menantang bagi peserta. Dalam menyelesaikan tugas, peserta dapat didampingi oleh fasilitator yang dapat mengajak peserta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara rasional.

BPPK telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan terbitnya peraturan ini membuka kesempatan untuk pengembangan dan inovasi metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode klasikal (yang merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama seperti pelatihan, seminar, kursus, penataran, lokakarya/*workshop*, dan pengembangan sumber daya manusia lain) dan non klasikal



(proses pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama seperti *e-learning*, pelatihan jarak jauh, magang/*on the job training*, pertukaran pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta, *mentoring*, *coaching*, keteladanan/*job shadowing*, dan pengembangan sumber daya manusia lain).

Di tahun 2017, BPPK telah menerapkan beberapa metode pembelajaran yang baru, seperti *blended learning* dan *open class*. *Blended learning* dapat dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran klasikal dan non klasikal. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala BPPK nomor PER-4/PP/2017 dan telah diterapkan pada beberapa pelatihan di Pusdiklat. Kemenkeu *Corporate University* mendefinisikan *blended learning* sebagai gabungan dari *class learning* dengan *e-learning*. Sebagai pengantar sebelum

pertemuan di kelas, peserta diklat dapat mengakses Kemenkeu *Learning Center* (KLC) yang merupakan bentuk *Knowledge Management System* (KMS) yang dikembangkan BPPK untuk Kemenkeu. Dengan terlebih dahulu mengakses KLC, diharapkan peserta diklat telah memiliki pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk dapat melakukan diskusi dan *knowledge sharing* di dalam kelas.

Metode *blended learning* menjadi inisiatif Kemenkeu Corpu dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya di tengah keterbatasan kesempatan pegawai untuk mengikuti pelatihan secara tatap muka. Mekanisme *blended learning* yang dikembangkan oleh Kemenkeu Corpu menggunakan berbagai macam *tools*, di antaranya berupa bahan ajar multimedia

Budaya untuk menyimpan serta membagikan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada selama ini semakin diperkuat dengan adanya kegiatan knowledge capture dan peluncuran Kemenkeu Learning Center (KLC).

audio dan visual, animasi, video tutorial, ilustrasi, dan model elektronik. Beberapa Pusdiklat di BPPK sudah menerapkan metode *blended learning* pada beberapa diklatnya, di antaranya Pusdiklat Keuangan Umum, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Evaluasi atas metode pembelajaran *blended learning* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPPK nomor PER-5/PP/2017 tentang Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Masukan atas perbaikan mekanisme evaluasi masih terus digali dari peserta dan seluruh unit penyelenggara pelatihan demi penyempurnaan proses evaluasi pembelajaran Kementerian Keuangan.

Metode berikutnya adalah *open class*. *Open class* merupakan sejenis *workshop* yang bisa diikuti oleh siapa saja, tidak hanya internal Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya. *Open class* berbeda dengan seminar, lokakarya, atau diklat yang temanya sudah ditentukan sebelumnya, tema yang diangkat di dalam *open class* lebih bersifat *up-to-date*. Pada pelaksanaannya, *open class* menganut metode pembelajaran dua arah sehingga lebih banyak diskusi di dalamnya. *Open class* di BPPK dimulai pada bulan April 2017 dan sampai awal tahun 2018, BPPK sudah menyelenggarakan sebanyak 75 *open class*. Saat ini, peraturan yang mengatur kegiatan *open class* masih dalam perumusan. Media sosialisasi dan promosi *open class* yang dilakukan Pusdiklat penyelenggara menggunakan poster yang disebarluaskan melalui media sosial. Tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan *open class* selama ini di antaranya adalah penentuan tema, waktu, dan narasumber.

Terobosan lain juga dikembangkan BPPK dari sisi manajemen pengetahuan. Budaya untuk menyimpan serta membagikan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada selama ini semakin diperkuat dengan adanya kegiatan *knowledge capture* dan peluncuran Kemenkeu Learning Center (KLC). Melalui KLC, selain peserta diklat dapat memperoleh materi pengantar diklat, semua orang dapat berbagi dan mencari pengetahuan yang diinginkan

dengan lebih mudah dan terkelola dengan baik. Hingga saat ini telah tersedia 679 video pembelajaran dan 89 *online course* di KLC. Akses terhadap KLC oleh pegawai dan peserta pelatihan kini juga lebih mudah karena telah tersedia aplikasi Kemenkeu Learning Center di *Google Playstore*. Dalam pengelolaannya, KLC memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi produksi (*producer*), yaitu pihak-pihak yang terkait dengan produksi materi pada aplikasi KLC, terutama untuk menu *course* dan menu *knowledge center*;
2. Fungsi penjaminan mutu atau verifikasi (*verificator*), yaitu pihak-pihak yang memberikan jaminan yang memadai bahwa materi yang diunggah ke dalam aplikasi, terutama untuk menu *Course* dan menu *Knowledge Center*, telah memiliki standar kualitas tertentu;
3. Fungsi operasi (*operator*), yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang berkaitan langsung dengan pengoperasian aplikasi KLC, seperti membuat jenis *course*, mengunggah materi KLC (menu *course* maupun *KC*), membuat jenis *CoP* dan lain-lain;
4. Fungsi keahlian (*expert*), yaitu pihak-pihak yang secara khusus diminta untuk memberikan keahliannya terkait dengan permasalahan tertentu pada forum *CoP*;
5. Fungsi moderasi (*moderator*), yaitu pihak-pihak yang memiliki fungsi memoderasi forum *CoP*;
6. Fungsi pendukung (*supporter*), yaitu pihak-pihak yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan bagi seluruh operasional KLC, baik dari sisi SDM, sisi keuangan maupun sisi teknis lainnya.

Di tahun 2018, frekuensi penyelenggaraan program pembelajaran dengan metode-metode di atas akan lebih tinggi seiring dengan meningkatnya variasi dan jumlah program yang dikembangkan oleh Pusdiklat dalam rangka implementasi *Corpu*. Hal ini sejalan dengan adanya IKU Persentase Konversi Kurikulum Pelatihan ke dalam *Instructional System Design* (ISD), IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya (Evaluasi Level 4 Kirkpatrick), serta IKU terkait utilisasi KLC. Rencananya, beberapa metode pembelajaran baru juga akan dirancang

di tahun 2018, di antaranya adalah *gamification*, *micro learning* dan *Massive Open Online Course* (MOOC).

Dari sisi peraturan, pada tahun 2018, akan dilaksanakan Program Legislasi Nasional untuk menyukseskan RPKM/RKMK terkait Knowledge Management yaitu sebagai berikut:

1. KMK Tentang Cetak Biru (*Blueprint*) Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Kementerian Keuangan Tahun 2017 - 2022;
2. PMK Tentang Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. KMK Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. KMK Tentang Tata Kelola Aplikasi Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) Kementerian Keuangan; dan
5. KMK Tentang Tata Kelola Aplikasi Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) Kementerian Keuangan.

Kendala yang dihadapi dalam transisi sistem pembelajaran dari segi teknis di antaranya adalah ketersediaan jaringan dan *bandwidth* yang belum memadai khususnya untuk satker di daerah. Dari sisi nonteknis, kendalanya yaitu perlunya perubahan mindset atas perubahan sistem pembelajaran. Seperti yang disampaikan Thomas and Brown (2011), memang akan sulit untuk mengubah keyakinan kalau sistem pembelajaran saat ini sudah seharusnya berubah dari *teaching focus* ke *student learning focus*. Hal ini telah disiasati BPPK dengan pelaksanaan internalisasi dan komunikasi terkait *Corpu* melalui Kemenkeu *Corpu Updates*. Di sisi lain, untuk menjangkau informasi tentang budaya belajar, akan dilaksanakan *Survey Learning Preferences* bagi pegawai Kementerian Keuangan. BPPK dengan strategi *Corporate University* terus melakukan berbagai pengembangan di segala aspek. Dengan itu semua diharapkan BPPK dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan akan sumber daya manusia yang andal dan terpercaya.

IMAM ASMA NUR ALAM MARBUN

Community of Practice:

Sebuah *Virtual Meeting Point* para Praktisi



Sebagai organisasi yang sedang membangun atmosfer belajar baru di Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Corporate University (*Corpu*), BPPK mulai intens mengembangkan berbagai metode pembelajaran baru yang merupakan perpaduan antara pendekatan tradisional dan modern. Pendekatan tradisional lewat pertemuan tatap muka di kelas tetap diperlukan karena tidak semua aspek dan materi pembelajaran dapat secara efektif disampaikan secara daring. Sementara pendekatan modern semakin dieksplorasi mengingat perubahan gaya hidup yang semakin cepat akibat teknologi berimbas kepada dibutuhkan pendekatan pembelajaran baru yang lebih cepat dan lebih mudah diakses. Untuk hal yang satu ini, BPPK memiliki Kemenkeu Learning Center (KLC), sebuah portal pembelajaran daring tentang keuangan negara yang bisa diakses siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Salah satu fitur utama KLC adalah *Community of Practice* (CoP). Sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran baru yang diterapkan di BPPK, fitur CoP di KLC pada awal penciptaannya diharapkan dapat menjadi wadah untuk berkumpul para member KLC yang memiliki keahlian dan minat tertentu. Di forum tersebut, mereka bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang suatu tema atau permasalahan tertentu yang pada akhirnya menambah kapasitas dari seluruh member. Pada tataran yang lebih tinggi, CoP diharapkan dapat memberikan rumusan jawaban atas permasalahan di organisasi. Perspektif CoP versi Kemenkeu Corpu ini sejalan dengan karakteristik CoP versi Wenger (2001) dimana untuk dikatakan sebagai CoP, sebuah komunitas harus terdapat dalam *domain* yang sama, memiliki *interest* yang sama, dan ada interaksi timbal balik yang menambah kapasitas para member di dalamnya.

Istilah *Community of Practice* (CoP) pertama kali dicetuskan oleh antropologis Jean Lave dan Etienne Wenger (1990, 1991) saat mereka meneliti tentang program magang sebagai salah satu metode pembelajaran. Istilah ini muncul dari kesadaran bahwa program magang bukan hanya tentang interaksi antara si pelaksana magang dan pemberi magang, tetapi lebih kompleks dari itu, ada banyak orang dan elemen yang terlibat membuat semacam atmosfer pembelajaran yang mempengaruhi pola interaksi dalam program magang tersebut.

Wenger (1991) mendefinisikan CoP sebagai sekumpulan orang yang memiliki perhatian dan ketertarikan yang sama atas sesuatu yang mereka kerjakan. Melalui interaksi yang reguler antar anggota di dalamnya, mereka terus menerus mencari solusi untuk memperbaiki cara mereka mengerjakan hal tersebut. Namun, tidak semua bentuk *community* dapat disebut sebagai *community of practice*. Sebuah Rukun Tetangga (RT) misalnya, kita bisa sebut kumpulan manusia terkecil ini sebagai *community*, tetapi kita tidak bisa serta merta menyebutnya sebagai CoP.

Lalu, apa yang menjadikan sebuah *community* bisa disebut sebagai CoP. Wenger (2001) menyebut setidaknya ada 3 karakteristik krusial yang harus dipenuhi:

THE DOMAIN

CoP itu bukan semata perkumpulan teman, geng, paguyuban, arisan atau perkumpulan sosial lainnya. Harus ada sebuah ketertarikan yang sama terhadap suatu hal di antara para anggotanya. Sederhananya, semua anggota harus memiliki satu identitas yang sama, satu wadah yang sama, satu *community* yang sama atas dasar ketertarikan terhadap sesuatu yang sama.

THE COMMUNITY

Memiliki ketertarikan yang sama saja tidak cukup, setiap anggota harus terlibat dalam aktivitas dan diskusi, menolong satu sama lain, serta saling berbagi informasi. Menjadi bagian dari *community* tersebut, artinya setiap anggota harus berkontribusi sesuai dengan kompetensi yang menjadi prasyarat menjadi anggota *community* tersebut. Kontribusi tersebut tidak harus besar atau berdampak luar biasa. Keahlian sekecil apapun yang bisa dibagikan dan menjadi *knowledge* bagi semua anggota sudah bisa dikatakan sebagai komitmen terhadap *community*. Intinya adalah membangun sebuah hubungan dimana semua anggota dapat belajar dari satu sama lain. Berada di kelas yang sama atau memiliki pekerjaan yang sama tidak bisa langsung dikatakan sebagai CoP, selama mereka tidak berinteraksi dan belajar bersama. interaksi tersebut juga tidak harus dilakukan setiap hari atau secara langsung.

THE PRACTICE

Sesuai dengan namanya, semua anggota *Community of Practice* sudah seharusnya merupakan praktisi. Ada berbagai sumber daya dan pengetahuan yang masing-masing

ACTIVITIES	EXAMPLES
Problem solving	"Can we work on this design and brainstorm some ideas. I'm stuck."
Requests for information	"Where can I find the code to connect to the server?"
Seeking experience	"Has anyone dealt with a customer in this situation?"
Reusing assets	"I have a proposal for a local area network I wrote for a client last year. I can send it to you and you can easily tweak it for this new client."
Coordination and synergy	"Can we combine our purchases of solvent to achieve bulk discounts?"
Discussing developments	"What do you think of the new CAD system? Does it really help?"
Documentation projects	"We have faced this problem five times now. Let us write it down once and for all."
Visits	"Can we come and see your after-school program? We need to establish one in our city."
Mapping knowledge and identifying gaps	"Who knows what, and what are we missing? What other groups should we connect with?"

Sumber: Wenger.2001. *Communities of Practice: A Brief Introduction*

Percakapan serius tentang pekerjaan dengan orang asing di pesawat misalnya, tidak bisa disebut sebagai CoP. Sebaliknya, obrolan informal para guru tentang metode pembelajaran saat mereka makan siang di kantin, bisa disebut sebagai CoP karena selain ada shared interest, juga terdapat shared information yang menjadi shared repertoire bagi guru-guru tersebut dalam memberikan pembelajaran.

orang seharusnya miliki dan bagikan di sana, entah itu berupa pengalaman hidup, cerita, materi, atau sesederhana tips dan trik dalam melakukan sesuatu yang mungkin menjadi *interest* anggota lainnya.

Wenger (2001) lebih jauh menambahkan jika interaksi dalam sebuah CoP bisa dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya adalah:

Dibutuhkan waktu dan interaksi yang panjang untuk sebuah CoP agar dapat menjadi *sustainable*. Percakapan serius tentang pekerjaan dengan orang asing di pesawat misalnya, tidak bisa disebut sebagai CoP. Sebaliknya, obrolan informal para guru tentang metode pembelajaran saat mereka makan siang di kantin, bisa disebut sebagai CoP karena selain ada *shared interest*, juga terdapat *shared information* yang menjadi *shared repertoire* bagi guru-guru tersebut dalam memberikan pembelajaran.

SEBUAH COLLECTIVE EFFORT

Per tanggal 24 Februari tahun 2018, telah ada 39 grup CoP di KLC dengan tema yang beragam dan beranggotakan lebih dari 732 orang. Angka ini belum memperhitungkan grup CoP dengan *platform* Whatsapp yang dikelola oleh Pusdiklat dan Balai Diklat yang apabila ditotal telah mencapai lebih dari 50 grup permanen. Mengapa ada istilah grup permanen? Karena mengambil contoh di Pusdiklat Pajak misalnya, grup CoP yang bersifat temporer dibentuk untuk dua diklat yaitu, DTSS Penelaah Keberatan dan DTSS *Operator Console* yang masing-masing terdiri dari banyak angkatan. Maksudnya, grup-grup ini hanya dibuat dan dikelola selama diklat berlangsung dan beberapa waktu setelahnya. Setelah itu, grup akan dinonaktifkan. Jadi, angka jumlah CoP yang sebenarnya bisa lebih

banyak lagi dengan jumlah anggota hingga ribuan orang.

Bayangkan Facebook, Kaskus, atau Comet BPPK. CoP BPPK memiliki fitur yang hampir sama. Setelah membuat akun KLC, Anda dapat langsung bergabung ke dalam grup yang Anda minati dan melakukan diskusi di dalamnya. Terdapat 3 level grup dalam CoP, yaitu:

- Public**
Siapapun yang memiliki akun KLC atau Kemenkeu ID bisa bergabung di dalamnya, tidak ada persyaratan tertentu.
- Private**
Grup-grup yang memiliki status private, bagi yang ingin bergabung di dalamnya harus mendapat approval dari administrator dari grup tersebut.
- Hidden**
Grup-grup dengan status *hidden* hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki tautan langsung (*direct link*) kepada grup tersebut. Grup-grup ini juga tidak akan muncul di tampilan daftar grup orang-orang yang bukan merupakan anggotanya.

Saat ini, hampir seluruh grup CoP di KLC berstatus *private* agar ada screening dari administrator grup sehingga anggota yang masuk grup sebisa mungkin benar-benar merupakan yang memiliki minat menjadi anggota, bukan sekedar iseng atau malah mengganggu.

KLC BPPK mengenal tiga level hierarki pengguna. Yang paling tinggi adalah administrator, saat ini dipegang oleh Bagian TIK BPPK. Pusdiklat dan Balai Diklat diberikan level pengguna *instructor* dan *author* yang memiliki level *authority* sedikit berbeda, tetapi sama-sama bisa membuat dan mengelola grup CoP. Dan sesuai dengan ujaran Kepala BPPK yang meyakini bahwa kesuksesan Kemenkeu Corpu seharusnya adalah *collective*

effort dari seluruh elemen Kementerian Keuangan, maka seluruh eselon I Kementerian Keuangan diberikan akses level *author* di KLC, sehingga khususnya untuk CoP, mereka bisa membuat dan mengelola grup sendiri apabila dirasa perlu.

PERLU TERUS DITINGKATKAN

Di umurnya yang belum satu tahun, tentunya masih diperlukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CoP BPPK. Masalah yang paling terlihat adalah meski jumlah grupnya cukup banyak, tetapi level interaksi di dalamnya masih perlu ditingkatkan. Pada praktiknya, banyak dari grup COP yang ada merupakan grup peserta diklat tertentu yang disematkan title CoP di depannya. Contohnya, grup CoP Bendahara Pengeluaran. Grup ini dikhususkan untuk peserta diklat Bendahara Pengeluaran yang akan, sedang, atau sudah mengikuti diklat tersebut. Salah satu peserta grup, Mukhtaromin, berharap agar komunikasi di awal pembentukan grup bisa dilakukan lebih intens dan detil, agar setiap anggota grup dapat memahami tujuan dan bagaimana berinteraksi di CoP.

Penyelarasan regulasi yang mendukung *Human Capital Management* melalui Kemenkeu Corpu menjadi salah satu agenda BPPK di tahun 2018. CoP menjadi salah satu item yang segera dibakukan regulasinya. Kepala BPPK pernah berujar terkait harapannya bahwa dengan Kemenkeu Corpu, BPPK bisa difungsikan sebagai meeting point yang menyenangkan bagi siapa saja untuk belajar tentang keuangan negara. CoP, jika dikelola dengan baik, seharusnya bisa menjadi sebuah virtual meeting point yang menyenangkan.



ARIMBI PUTRI

Membangun Negeri Bersama “PKN STAN Goes to Villages”



Tahun 2018 menjadi momen bersejarah bagi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Di bulan kedua tahun ini, PKN STAN memantapkan langkah pertama untuk mengabdikan ke masyarakat desa melalui kegiatan “PKN STAN Goes to Villages”. Kegiatan yang dilaksanakan lima hari mulai 19-23 Februari 2018 ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kementerian Keuangan yang menaungi PKN STAN, yang salah satu tujuannya untuk mengawal pengelolaan dana desa.

PKN STAN Goes to Villages merupakan wujud implementasi dari Nawacita Presiden Joko Widodo pada butir ketiga, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Sebagai institusi dengan keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara, PKN STAN berkontribusi terjun langsung mendampingi aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut.

Sejak dirintis 2015 silam, sudah banyak infrastruktur yang terbangun melalui dana desa, namun juga tak sedikit permasalahan yang muncul terkait pengelolaan keuangannya. Menurut Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto, salah satu masalah terbesar adalah pertanggungjawaban keuangan.

“Bagi desa, pertanggungjawaban keuangan belum begitu dipahami. Selain itu, ada juga masalah pencatatan aset desa serta pengadaan barang dan jasa. Di desa lebih banyak swakelola tanpa memikirkan bukti. Sejak ada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), semua yang dilakukan harus disertai bukti,” kata Rahmadi.

Program ini menjadi salah satu sarana agar mahasiswa dapat bersinergi dengan masyarakat sekaligus mengimplementasikan ilmu dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan. Maka, lanjut Rahmadi, diresmikan kegiatan yang serupa kuliah kerja nyata (KKN) ini sebagai suatu program dan ditambahkan ke dalam kurikulum PKN STAN.

Guna memberikan pendampingan yang maksimal, mahasiswa mengikuti serangkaian pelatihan sebelum berangkat ke desa, seperti pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), materi kepemimpinan, dan teknik komunikasi. Selain itu, mahasiswa diberi pembekalan menjelang pelepasan mereka ke desa. Pembekalan dilakukan langsung oleh Direktur PKN STAN beserta jajarannya.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah PKN STAN. Kata orang 1.000 langkah diawali oleh langkah pertama. Jadi pertama ini harus yakin, pertama akan menentukan langkah



selanjutnya,” urai Rahmadi.

Sebelum keberangkatan pada 19 Februari pagi, Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti memimpin apel dan memberikan amanatnya kepada para peserta PKN STAN *Goes to Villages*. Dalam pidatonya, Astera berpesan agar mahasiswa senantiasa menjaga kehormatan kampus serta menjaga kesehatan selama menjalani kegiatan. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Kepala BPPK untuk menyampaikan amanat dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

“Pesan dari Ibu Sri, agar kita mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga dampak dari PKN STAN bisa dirasakan masyarakat luas, serta memperkenalkan PKN STAN kepada warga desa,” kata Astera saat apel.

Kepala BPPK itu pun optimistis seluruh mahasiswa sudah siap mengabdikan diri kepada masyarakat, dan berharap mendapat tanggapan dan hasil yang positif usai kegiatan dilaksanakan. Astera melanjutkan, desa merupakan bagian terdasar dari pemerintahan. Anggaran desa yang nilainya sangat signifikan, bisa berujung kasus hukum jika tidak diikuti pengelolaan yang baik. Oleh sebab itu, mantan

Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara ini berharap peserta dapat memberikan bantuan untuk menjaga pengelolaan keuangan di desa dan memaksimalkan potensi badan usaha milik desa (BUMDesa).

Kegiatan ini pun mendapat tanggapan positif dari Menteri Keuangan. Beliau meminta program yang bagus ini untuk diawasi dengan baik dan semestinya. Tak lupa Sri berpesan kepada mahasiswa untuk senantiasa santun dalam berperilaku. “Jaga tingkah laku dan interaksi dengan masyarakat desa, agar mampu membantu dengan membangun sistem dan kesadaran pengelolaan keuangan yang baik,” pesan Sri Mulyani Indrawati yang disampaikan melalui Kepala BPPK.

TETAP BERPARTISIPASI DI HARI TERPENTING

Ada hal yang unik dari pelaksanaan perdana



PKN STAN *Goes to Villages* ini. Esterlina Novianti, mahasiswa DIII Pajak Alih Program yang menjadi salah satu peserta, melangsungkan pernikahan tepat dua hari sebelum kegiatan dimulai. Ester, sapaannya, sempat gamang tatkala dia dan suaminya telah merencanakan berlibur di tanggal pelaksanaan kegiatan.

“Suami sempat kecewa, dan minta saya untuk ikut KKN tahun depan saja. Tapi saya memaksa, *memelas-melas* biar diizinkan,” ucap Ester saat diwawancarai.

Sebagai solusi, Ester mengikuti kegiatan di desa namun tidak ikut menginap. Pegawai KPP Semarang Tengah 1 ini memilih untuk pulang-pergi dari penginapan ke tempat pelaksanaan kegiatan. “Ya, akhirnya bulan madunya di sini saja,” urainya seraya tertawa. Ester pun sebenarnya mengetahui adanya pengecualian bagi mahasiswa yang berhalangan ikut karena alasan penting. Namun, dia tetap bersikukuh

“Pengabdian mahasiswa PKN STAN ke desa merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang”

ikut karena tidak ingin tertinggal dengan teman-teman yang lainnya.

Meski sempat terkejut dengan persiapan kegiatan yang tergolong singkat ini, Ester mengaku senang karena bisa belajar banyak dari kegiatan di desa. “Seru sih, karena suasananya desa banget. Kita juga bisa tahu apa saja yang dilakukan di kantor desa,” ungkap mahasiswa asal Wonogiri, Jawa Tengah tersebut.

DESAKU BISA

Program pengabdian masyarakat ini mengusung tema “Desaku Bisa” yang merujuk pada kemandirian desa dengan memaksimalkan potensi dan BUMDesa. Di pengujung pelaksanaan, perangkat desa yang diwakili kepala desa/lurah mengutarakan rasa senangnya dengan kehadiran PKN STAN di tengah-tengah mereka. Salah satunya diungkapkan Wawan Irawan, Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten.

Wawan mengatakan, masyarakat desa menerima dengan sangat baik kehadiran PKN STAN dan berharap pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung 2-3 bulan. Tak hanya bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, Wawan menyatakan kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat desa bisa memicu anak-anak untuk

mengenyam pendidikan lebih tinggi.

“Desa kami hasil survei bahwa yang paling banyak itu keluaran (lulusan) SD. Untuk sarjana itu hanya beberapa orang saja. Dengan kehadiran PKN STAN ini kami berharap minat untuk kuliah semakin hari semakin banyak. Saya sangat berterima kasih,” urai Wawan.

Hal ini pula yang menurut Ketua Senat sekaligus Ketua Jurusan Pajak PKN STAN, Fadlil Usman, menjadi pembeda antara PKN STAN dengan kampus lain yang mengabdikan ke desa. Fadlil menegaskan, pengabdian mahasiswa PKN STAN ke desa merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang.

“Kita tidak membangun jembatan, kita tidak membangun sumur, dan sebagainya. Tapi kita investasi di pengembangan SDM, sifatnya jangka panjang. Kalau ada warga desa yang masuk PKN STAN, itu malah sangat bagus untuk pengembangan desa ke depannya,” kata Fadlil saat berkunjung ke Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pelaksanaan perdana PKN STAN *Goes to Villages* ini tentunya masih harus melalui banyak perbaikan. PKN STAN akan terus berbenah dan mengkaji masukan-masukan dari berbagai pihak guna pengabdian masyarakat yang lebih optimal dan berdaya guna. Bangun bersama, desaku bisa!



MUHAMMAD IRFAN

Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Desa Dengan Baik

Pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2018 telah terlaksana Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa. Acara tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi (Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah) sebagai awal dari rangkaian pelatihan tentang desa yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi.



Sering dengan Nawacita Presiden Joko Widodo pada butir ketiga, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa di buka oleh Bapak Syamsu Syakbani, M.Sc selaku Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, di Kendari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diselenggarakan

oleh Pemerintahan Desa yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari lembaga Desa disamping Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), desa akan menerima penyaluran dana desa apabila telah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Dengan demikian, penyusunan APBDesa menjadi syarat untuk dapat dilakukannya dana desa oleh Kementerian Keuangan.

Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.



Untuk itu, percepatan pelaksanaan pelatihan mengenai perencanaan dan penganggaran desa diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian peraturan desa tentang RPJM Desa dan APBDesa. Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama-sama melakukan percepatan penyaluran pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra desa), dan

lain-lain. Tidak kalah penting juga dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Agar penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai azas-azas penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang salah satunya berupa Peraturan Desa. Sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, Peraturan Desa diharapkan menjadi regulasi yang aspiratif dan partisipatif yang mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum,

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat sebagai salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum.

Kepala Desa yang ikut menghadiri acara tersebut diharapkan dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran desa dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan, yaitu dapat menyusun Rencana Jangka Panjang Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan Peraturan Desa tentang Perencanaan dan Penganggaran Desa.



Henri Kartikawati

Pemberi Beda yang Selalu Mengutamakan Respect pada Sesama

DODI SEPTARIZA

Terkesan diam dan tidak banyak bicara. Bagi sebagian orang yang belum mengenalnya, ketegasannya acap disalahartikan dengan galak. Sejatinnya ia hanya pribadi unik perpaduan melankolis dan koleris –kepekaan dan ketegasan- yang selalu mencari hal baru dalam setiap pekerjaan yang diembannya, tanpa pernah melupakan respek terhadap siapapun yang bekerja bersamanya. Inilah profil Henri Kartikawati.



Pagi itu, setelah sempat tertunda karena kesibukan di hari yang dijadwalkan, janji untuk bertemu perempuan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Kepemimpinan (BDPim) ini terwujud juga. “Maaf banget ya mas”, permintaan maaf dengan logat Jawanya yang kental mengawali perbincangan kami. Ya, kami memang sampai harus menunda kepulangan ke Jakarta untuk mendapatkan waktunya. Selanjutnya, mengalirlah cerita tentang dirinya.

Henri Kartikawati lahir di Yogyakarta, 18 Desember 1970, dari keluarga asli Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Yogyakarta. Menggunakan nama “kartika” membuatnya sering disangka lahir dari keluarga militer. Lahir dari Ayah dan Ibu yang mengabdikan sebagai PNS, Henri Kartikawati adalah bungsu dari lima perempuan bersaudara. Almarhum Ayah dan Ibunya adalah PNS. Ayahnya adalah sosok yang mendominasi pembentukan karakternya. Seorang ayah yang meskipun lima anaknya perempuan semua, tetapi sangat disiplin dan tegas. “Mungkin kalau kami laki-laki semua, Bapak bakal lebih galak lagi,” ujar Henri sambil tertawa saat mengenang masa kecilnya.

Henri tidak berkeberatan kalau ada yang menyangkanya galak karena ia sangat yakin itu hanya karena mereka belum mengenalnya. Henri juga tidak berkeberatan dibilang galak apabila menyangkut komitmennya pada kualitas pekerjaan dan atau mendudukan sesuatu pada hal yang seharusnya. “Tetapi sangkaan itu berubah ketika mereka sudah kenal lebih dekat dengan saya”. Dengan nada bercanda, Henri mencoba mengkonfirmasi kepada kami, “Memang saya galak ya?”

Ciri lain yang sangat melekat pada seorang Henri adalah medok Jawa nya. Dalam setiap tuturnya selalu ada Bahasa Jawa, tidak memandang siapa yang diajak bicara. Bahkan tidak jarang, untuk menunjukkan rasa hormat dan respek pada mereka yang lebih senior dan atau dituakan, Henri menyelipkan penggunaan Bahasa Jawa halus (kromo red). Kentalnya

darah Jawa pada sosok perempuan ini yang juga membawa pada kecintaannya terhadap semua hal yang berbau Jawa.

GAMELAN, PENDHOPO, DAN PONOKAWAN

Beberapa waktu sebelum dilakukannya wawancara ini, BDPim baru saja memiliki hajat besar meresmikan pemugaran Pendhopo Mulyatno Sindhudarmoko yang menjadi ikon BDPim. Konsep jawa sangat mewarnai acara peresmian tersebut, dari bahasa yang digunakan, busana yang dikenakan, dekorasi yang ditampilkan, hingga makanan yang disajikan sampai dengan pertunjukkan para ponokawan yang ditampilkan oleh para pegawai BDPim sendiri. Ponokawan dipilih untuk mencitrakan BDPim yang selalu bisa menginspirasi dan mencerahkan.

Menurut Henri, bukan semata-mata karena dia orang Jawa maka dia sangat peduli dengan upaya merenovasi pendopo dan sekaligus mempercantiknya dengan estetika pendopo yang syarat dengan filosofi, tapi juga mempertimbangkan keberadaan Balai yang berdekatan dengan deretan bangunan *heritage* dan manfaat pendopo bagi BPPK, Kementerian Keuangan dan masyarakat Magelang. “Saya sangat bangga dan juga sangat bersyukur karena mulai dari sekedar gagasan sampai dengan terwujud dan diresmikan, banyak kemudahan yang saya peroleh. Alhamdulillah acara juga berjalan lancar dan yang lebih membanggakan, kemasannya kami menginspirasi kantor lain terutama yang kami undang saat peresmian. Pendopo BDPim juga semakin dilirik oleh masyarakat”, tuturnya.

Terkait dengan gamelan, di BPPK, sosok Henri juga cukup identik dengan gamelan. Hal ini mengingat pada kurun waktu sebelumnya, ia sempat mengomandani tim gamelan putri BPPK. Sebenarnya yang ia kuasai adalah gamelan Jawa, tapi di BPPK ia memainkan gamelan Bali. “Kepala Badan (Bapak I Made Gde Erata) yang meminta saya mengkoordinir

“Bagi saya, Bagian OTL adalah sekolah saya selanjutnya”

teman-teman membentuk tim gamelan karena melihat saya bisa main gamelan saat rakor BPPK di Magelang”. Tim ini berlanjut hingga BPPK dipimpin oleh Bapak Permana Agung, kebetulan dua sosok panutan tersebut pecinta gamelan Bali.

Ketika ditanya mengapa dirinya menyukai musik gamelan, Heni menjawab singkat, “Karena harmonisasinya menyenangkan”. Ayahnya setiap hari selalu memutar kaset gending Jawa saat di rumah dan itu menumbuhkan kecintaannya pada gamelan. “Saya senang bisa main gamelan lagi dan juga senang bisa memberi pengalaman baru pada teman-teman lain di BPPK untuk main gamelan. Kami bahkan sempat pentas beberapa kali di hadapan menteri dan pejabat Kemenkeu lho”, tuturnya dengan berbinar.

AWAL KARIR DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Heni Kartikawati menempuh pendidikan S-1-nya pada Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Ia lalu melanjutkan pendidikan Profesi Psikologi di tempat yang sama. Kala masih menempuh pendidikannya, Heni “iseng-iseng” mengikuti kakaknya yang mendaftar menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Tak disangka Heni berhasil diterima di Kementerian Keuangan.

Awalnya menjadi pilihan yang sulit bagi Heni karena harus memilih tetap melanjutkan studi profesi Psikologi atau bekerja di Kementerian Keuangan. Di tengah kebimbangan itu, Heni lantas meminta saran orang tua. “Kalau cari sekolah itu bisa dicari nanti, tapi kalau cari kerja itu mungkin enggak datang dua kali kesempatannya,” saran sang Ayah. Akhirnya, dengan memegang restu orang tua, Heni pun memilih meninggalkan kuliah profesinya dan memulai petualangan karirnya di Kementerian Keuangan melalui BPPK.

3 tahun bekerja di Bagian Tata Laksana BPPK, datanglah tawaran melanjutkan pendidikan melalui beasiswa S-2. Awalnya Heni belum berminat mengikuti seleksi beasiswa karena anaknya masih sangat kecil kala itu. Namun lagi-lagi keberuntungan menghampiri, Heni

dinyatakan lulus sebagai calon penerima beasiswa. “Saya *nangis* waktu dikasih kabar kalau lolos. Bukan apa-apa, tapi kaget, nggak nyangka, dan bingung juga takut”. Ia merasa belum punya persiapan apa-apa. Dengan dukungan penuh dari suami, orang tua dan kakak-kakaknya, ia akhirnya mengambil kesempatan itu dan kuliah di Universitas Nagoya, Jepang.

Dua tahun berlalu, Heni berhasil menuntaskan program masternya dan kembali ke tanah air dengan membawa pengalaman belajar di negeri orang dan kepercayaan diri yang lebih meningkat karena kesadaran atas keyakinan bahwa ternyata dirinya bisa menjalani dan bahkan menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Lebih dari itu, kuliah profesi Psikolog yang sempat tertunda sudah pula berhasil diselesaikannya.

BAGIAN OTL ADALAH SEKOLAH SELANJUTNYA

Tidak lama setelah kembali, Heni dipromosikan sebagai Pejabat Eselon IV di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sebagai pejabat yang menangani widyaiswara selama 4 tahun. Setelah sempat dimutasi ke Bagian Bina Program selama 8 bulan, pada tahun 2008 ia dipromosikan sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Bagian OTL) Sekretariat BPPK.

Masa-masa bekerja di OTL merupakan masa pembelajaran yang luar biasa bagi Heni karena pada masa itulah proses Reformasi Birokasi di Kementerian Keuangan pertama kali bergulir. Banyak hal yang harus dibangun dari awal sebagai pondasi pelaksanaan Reformasi Birokasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Saking banyaknya hal-hal yang harus ia selesaikan saat menjabat sebagai Kepala Bagian OTL dan juga bervariasi dinamika organisasi yang harus ia lalui, ia bahkan berujar, “Bagi saya, Bagian OTL adalah sekolah saya selanjutnya”. Selama mengabdikan bersama rekan OTL, Heni merasa mendapatkan pengalaman bekerja yang sangat luar biasa. Tidak saja karena jenis dan jumlah pekerjaan yang harus ia selesaikan, tapi juga ragam tantangan saat menyelesaikannya.

“Meski tantangannya luar biasa, tapi saya bangga berada di OTL selama 6 tahun”. Dalam kurun waktu itu banyak produk yang sudah dihasilkan mulai dari kebijakan yang terkait dengan pengembangan organisasi termasuk kelembagaan PKN STAN, peletakan dasar pengukuran kinerja dan pengelolaan risiko, perumusan proses bisnis dan series pedoman kediklatan, kajian akademis, pembangunan uji mutu proses bisnis kediklatan melalui ISO 2001:9008 dan lain-lain. Heni juga menceritakan bagaimana dirinya harus mensupport pimpinan untuk menjawab wacana pembubaran BPPK pada saat itu, yang pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan dan bahkan kemudian fungsinya semakin dikuatkan dan dikembangkan.

ANUGERAH RANGKAP JABATAN

Berpindah ke Bagian Kepegawaian merupakan hal yang mengejutkan untuk Heni Kartikawati. “Mungkin pimpinan punya pertimbangan karena latar pendidikan saya yang dirasa cocok sebagai Kepala Bagian Kepegawaian. Berkah lainnya karena saya hanya pindah pintu dari Bagian OTL”, tuturnya sambil tersenyum.

Mutasi menjadi Kepala Bagian Kepegawaian tidak membuatnya berubah cara kerja. Prinsipnya harus ada yang berbeda, “Saya selalu menekankan beda. Beda itu penting karena dengan menemukan hal yang berbeda dan melakukan dengan cara yang berbeda, maka saya bekerja. Kalau sekedar mengerjakan apa yang dikerjakan orang lain, atau membiarkan sesuatu seperti biasanya, menurut saya itu bukan kerja”, timpal Heni.

Dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 2 tahun di Bagian Kepegawaian, cukup banyak perubahan dan perbedaan yang sudah dilakukan. Heni menginisiasi antara lain INKK, pengatur standar *capacity building*, program ketahanan keluarga, pemanfaatan data absensi untuk *early warning* pelanggaran, SKT, penyempurnaan HCDP, kenaikan grading pejabat fungsional dosen dan widyaiswara, pengangkatan dosen, dan lain-lain. Pada saat ia menjabat Kabag Kepegawaian pula, BPPK dalam 2 tahun tersebut sempat merayakan HUTnya.



Terdapat pengalaman berharga yang diperolehnya saat menjadi Kepala Bagian Kepegawaian, yaitu saat harus merangkap jabatan sebagai Plt Sekretaris Badan. “Hampir 1 tahun saya rangkap jabatan. Semua proses dan tanggung jawab yang besar untuk mengomandoi Sekretariat Badan memberi saya kesempatan belajar yang sangat luar biasa. Tantangannya luar biasa karena Sekretariat BPPK memegang kendali kebijakan untuk seluruh unit di BPPK. Dinamika komunikasi yang harus saya jalani sebagai Kabag dan sebagai Plt Sesban, bertumpuk-tumpuk disposisi dalam 1 hari, termasuk puja puji dan sentilan telinga kanan kiri sangat mewarnai hidup saya selama itu”, ujarnya sambil tertawa.

Satu hal yang berkesan adalah saat harus memproses pengangkatan pertama para calon dosen pada PKN STAN. Heni harus membangun sistemnya mulai dari nol, dimulai dari seleksi, penghitungan angka kredit awar, sampai dengan proses pengangkatan. Semua proses yang harus dapat mengakomodasi semua kepentingan pihak terkait, DIKTI, Menpan, BKN, Biro SDM, BPPK dan para calon dosen sendiri.

Hal itu yang kemudian menjadi *challenge* adalah untuk bisa meyakinkan semua pihak mengenai

kebijakan yang diambil dan bahwa Bagian Kepegawaian tidak berhenti mengupayakan hal-hal yang dibutuhkan tersebut dengan tetap mengakomodasi banyak kepentingan. “Resiliensi saya meningkat selama proses itu. Terlalu panjang kalau diceritakan. Alhamdulillah, para calon dosen tersebut sudah diangkat dan sudah ada rekrutmen selanjutnya”, Heni menuturkan.

Berkenaan dengan Corpu, Heni mengingat masa itu bagaikan diminta membuat kapal selam, “Kita tahu bentuk dan variasinya seperti apa, tapi nggak punya kapasitas untuk membuatnya. Sama ketika kita membaca dan belajar tentang *Corpu*. Kita merasa tahu semua hal tentang *Corpu* dengan membaca dan melihat, tapi ketika ditanya apakah bisa bikinnya? Kita nggak tahu mulai dari mana,” jelas Heni. Sementara di satu sisi kebutuhan untuk dapat segera memiliki konsep Corpu harus segera diwujudkan

Sesuai dengan kewenangannya pada waktu itu, Heni memulai dengan mengembangkan kapasitas pegawai BPPK terkait *Corpu* melalui serangkaian benchmarking dan workshop. Heni menuturkan, “Saya fokus pada tujuan dari workshop ini yaitu membangun kapasitas teman-teman BPPK terkait *Corpu*. Mengang

proses itu panjang dan di *ending* proses itu ada konsep *blue-print* yang dihasilkan yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Alhamdulillah, terlepas dari pro dan kontranya, saya bangga dan bersyukur hasilnya dipakai dan menjadi dasar pengembangan Kemenkeu Corpu sampai dengan hari ini,” tuturnya sambil mengenang masa tersebut.

MENAMBAH DAN MENGUATKAN SAYAP, UNTUK TERBANG LEBIH TINGGI

Setelah 8 tahun berkuat di Sekretariat Badan, Heni dipindahtugaskan menjadi Kepala Balai Diklat Kepemimpinan (BDPim) pada awal 2017. Harapan pimpinan, dengan menjadi kepala balai, Heni akan memiliki sayap yang lengkap dan kuat, sehingga punya kemampuan terbang yang jauh dan tinggi. “Tentunya pimpinan juga berharap saya menjadi lebih matang dan teruji dengan memimpin sebuah balai diklat. Mudahnya barangkali saya harus tetap bisa berkinerja ketika tidak di sekretariat. Ya (kalau) diibaratkan ketemu organisasi pernah, ketemu SDM pernah, membuat peraturan tentang organisasi dan peraturan SDM sudah saya jalani, membuat proses



bisnis kediklatan sudah saya lakukan, pastinya harusnya bisa memimpin Balai (Balai Diklat Kepemimpinan)”.

Mengawali bekerja di jabatan baru, Heni menempatkan dirinya pada posisi “zero” karena ingin belajar lebih banyak dulu dari pengalaman mereka yang sudah sekian lama di BDPim. Penguasaan medan adalah kekuatan utama mayoritas pegawai karena jangka waktu penempatan yang lama di BDPim. Namun, di satu sisi, kondisi tersebut telah menciptakan zona nyaman, terlebih hampir seluruh pegawai memang berdomisili di Magelang. Bekerja berdasarkan kebiasaan mendominasi ritme pegawai. “Mungkin juga karena *privilege* yang dimiliki BDPim ya terkait dengan program yang diselenggarakan, jadi ibaratnya kita diam saja bisa *nggelandhing* sendiri”, ujarnya. Namun

bagi Heni, justru *privilege* itu harus menjadi kekuatan untuk menciptakan tantangan baru yaitu bagaimana seluruh komponen BDPim harus lebih berani menjawab tantangan kualitas alumni diklatpim.

Mengapa demikian? “Karena fokus diklat BDPim tidak banyak. Kalau untuk itu saja kita tidak bisa, terus kita kerja tujuannya apa dong?” jawab Heni. Heni menekankan kepada seluruh jajarannya di BDPim, “Bahwa dari tempat yang tidak seberapa luas ini, akan muncul pemimpin-pemimpin di Kementerian Keuangan, seperti contohnya Pak Prima (Kepala BPPK-red) adalah alumni dari Diklatpim Tk IV dan Tk III di sini.”

“Pertanyaan pertama saya kepada semua pegawai adalah: Ibaratnya kalau Kementerian

Keuangan itu punya alat ukur mutu alumni, yakinkah alumni kita itu lolos uji tersebut? Seberapa persen keyakinannya? Dan benar, tidak ada yang bilang yakin 100% atau bahkan 50% berkualitas pun tidak ada. Kalau begitu, ayo kita bersama-sama melakukan perbaikan,” jabar Heni.

Perubahan pertama tentunya mengutamakan sisi pelayanan seluruh pegawai di BDPim, baik itu struktural, fungsional sampai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non PNS-red) kepada peserta sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Pelayanan yang menyeluruh kepada peserta mulai dari mereka masuk gerbang, sampai keluar gerbang BDPim (kembali ke unitnya masing-masing). Melalui serangkaian pertemuan, *brainstorming*, dan pembahasan dengan seluruh komponen

BDPim, perbaikan dan pembakuan standard layanan berhasil dilakukan. Dan yang terpenting dari itu adalah bahwa seluruh komponen BDPim menyadari arti penting untuk bekerja dengan bertujuan dan berbeda agar harapan menghasilkan alumni diklat yang berkualitas dapat diwujudkan. Semua perbaikan dilakukan, mulai dari yang paling sederhana terkait administrasi persuratan sampai dengan yang terkait dengan standard kualitas bagi peserta, penyelenggara, dan pengajar.

Konten pelatihan juga tak luput dari perhatian Heni. Ketika kurikulum sudah ditetapkan LAN, maka peran BDPim adalah menciptakan sesuatu dengan cara yang berbeda agar lebih dapat dinikmati dan menciptakan kesan bagi peserta. Perbedaan itu menyangkut seluruh hal mulai dari *delivery* materi, proses *benchmarking*, pendampingan, sampai peningkatan kualitas laporan peserta yang tidak hanya menjadi syarat lulus diklat semata, tetapi juga harus mempunyai dampak yang lebih luas. Heni menyampaikan visinya, “Saya ingin, jika alumni ditanya apa yang mereka dapat dari diklatpim di Magelang, mereka dengan yakin akan menjawab bahwa karir mereka bagus karena kapasitas memimpin yang bagus yang diperoleh dari BDPim. Jadi bukan ingat makanannya atau kesempatan berwisata di seputar Magelang dan Jogja. Sepertinya sepele, tapi tidak mudah untuk dicapai”, jelasnya.

Sejalan dengan visinya untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas kepada peserta, selain proyek pendopo yang sudah selesai, di tahun ini Heni berencana mewujudkan impiannya merenovasi sekaligus meningkatkan kemanfaatan gedung B yang merupakan sentral pembelajaran diklatpim dan akan diwujudkan menjadi laboratorium kepemimpinan. “Saya ingin semua praktek kepemimpinan terutama yang ada di Kementerian Keuangan setidaknya bisa saya masukkan di Laboratorium Kepemimpinan ini, sehingga bisa diakses dan menjadi sumber belajar peserta,” ujar Heni. “Untuk renovasinya, saya memiliki konsep desain yang tidak biasa. Alhamdulillah para Widyaiswara sangat mendukung dan mudah-mudahan konsultan perencana mampu mewujudkannya”

Untuk mewujudkan impiannya ini, lagi-lagi Heni merasa beruntung dan dimudahkan. Hal ini mengingat, sebenarnya BDPim untuk tahun anggaran 2018 tidak mendapatkan alokasi belanja modal. Bermoldakan pengalaman mengelola belanja modal di tahun sebelumnya dan keberanian mengajukan gagasannya

kepada pimpinan, akhirnya anggaran tersebut dapat diperoleh BDPim di tahun ini.

BDK PIM DAN KEMENKEU CORPU

“Saya membawahi unit yang hanya satu di Kementerian Keuangan dengan tugas yang tidak mudah karena objek yang dididik adalah pemimpin. Meskipun kurikulum dari LAN, saya harus *concern* dengan hal itu dan harus menambahkan sesuatu yang berbeda, karena sedikit banyak apa yang mereka dapatkan disini akan dibawa mereka ketika memimpin di Kementerian Keuangan. Saya ingin peserta bisa saling belajar di antara mereka, saya ingin mereka belajar banyak dari narasumber dan juga belajar dari tempat *benchmarking* yang dikunjungi,” tegas Heni. “Suatu saat nanti, setidaknya saya bisa bilang 50% kontribusi pembangunan karakter kepemimpinan di Kementerian Keuangan adalah dari pengalaman di BDPim” harapan Heni.

Terkait peran BDPim pada strategi Kemenkeu *Corporate University*, Heni menjelaskan bahwa, “Kalau kita kembalikan dalam filosofi *Corpu* yaitu apapun yang diberikan ke peserta diklat, itu harus kembali kepada organisasi, kegiatan *experiential learning* pada kurikulum diklat pim sudah mewakili itu. Yang perlu ditinjau adalah esensi dan substansi penugasannya dan kapasitas lingkungan yang membangun dan menyempurnakan kemampuan peserta terhadap kompetensi kepemimpinan tersebut”. Dengan berfokus pada yang itu saja, banyak PR yang menurutnya harus ia kerjakan.

“Ketika saya bermimpi semua alumni BDPim menjadi pemimpin yang berhasil karena peran Diklatpim yang diikutinya, maka nilai-nilai *Corpu* itu sudah tertanam melalui kapitalisasi para pemimpin sebagai aset organisasi”. Tidak ada anggaran disia-siakan ketika mereka bisa memberikan kontribusinya kepada organisasi melalui kepemimpinan mereka,” lanjut Heni.

Heni menambahkan, “Memang masalahnya adalah kepemimpinan itu adalah sesuatu yang *intangible*. Itulah yang menyebabkan sulit untuk mengukur kinerja kami dalam konteks *Corpu*”. Tapi ia yakin kontribusi kepemimpinan besar karena sebenarnya kemampuan teknis itu tidak mendominasi kinerja. Yang lebih mendominasi kinerja adalah kemampuan yang *intangible*, seperti motivasi, karakter, kemauan, kemampuan komunikasi, hubungan *interpersonal* yang terbentuk pada pemimpin yang berkarakter. Sejago-jagonya orang pada kemampuan teknis ketika semua itu nggak ada,

saya yakin dia pasti *failed*.”

RESPECT IS EVERYTHING

Pada akhirnya, menurut Heni, hubungan profesional itu tidak akan bisa terbangun dengan baik tanpa adanya hubungan personal yang baik. Oleh karena itu, Heni senantiasa dekat dengan pegawai-pegawainya di mana pun dia berada. Heni bercerita bagaimana pada saat dirinya di Bagian OTL dan Kepegawaian yang didominasi oleh kaum *millennials*. Ia pun membuat pola komunikasi dengan cara yang kekinian juga sehingga alur kerja menjadi lebih cepat dengan memaksimalkan cara pikir yang cepat dari kaum *millennials* itu. Berbeda dengan situasi di Balai Diklat Kepemimpinan yang sebaran pegawainya masih terdapat kalangan senior

Di BDPim, Heni memperlakukan para pegawai muda dengan cara memberikan berbagai tantangan untuk mereka dengan pendekatan ala Heni agar menumbuhkan antusiasme. Pendapat Heni, “Antusias itu adalah indikator *millennials engage* dengan organisasinya. Ketika mereka antusias terhadap sesuatu meskipun ditunjukkan dengan cara apapun, itu menandakan bahwa ide pimpinan tersebut *kebeli* sama *milenials*.”

Pegawai-pegawai senior yang ada di Balai Diklat Kepemimpinan dianggap suatu berkah tersendiri bagi Heni, “Walaupun mungkin dari sisi kecepatan pekerjaan tidak bisa *catch up* dengan kebutuhan organisasi, tapi dari mereka kita bisa ambil pengalamannya di lapangan, komunikasinya yang luas, kebijaksanaan mereka-itulah hal-hal yang justru tidak dimiliki anak-anak muda.”

Ada satu kunci kehidupan yang didapat Heni dari ayahnya, yaitu, “Ketika kita memberi respek kepada orang lain, kita akan mendapatkan itu kembali kepada diri kita. Respek itu ada bukan karena kita cari tapi karena kita member”. Dengan respek, setiap dari kita akan merasa diistimewakan dan diakui keberadaannya dan itu menumbuhkan kecintaan pada diri dan pekerjaan mereka. Organisasi akan mendapatkan bonusnya dari orang-orang yang bisa saling respek ini, oleh karena itu *Respect is Everything*.

Serambi Ilmu

Rinaningsih | HARMONISASI KETENTUAN
PEMBUKUAN PAJAK PUSAT
DAN PAJAK DAERAH

Rahmat Nugroho | DUPLICATE
VERSUS EXTEND
KETEPATAN MEMILIH
MODE TAYANG
PRESENTASI PADA
MICROSOFT POWERPOINT

Frenda Nic Qomar Ernanto | REFLEKSI IMPLEMENTASI
SIMPONI DALAM
PEMBAYARAN/
PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

RINANINGSIH
WIDYAIKWARA MADYA PUSDIKLAT PAJAK

HARMONISASI KETENTUAN PEMBUKUAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mendefinisikan secara sama pengertian pajak dan pembukuan. Namun, lebih jauh, kedua Undang-undang tersebut tidak selaras mengatur lebih lanjut mengenai pembukuan. Hal ini berpotensi membuat bingung Wajib Pajak yang terutang pajak pusat maupun daerah. Padahal seringkali Wajib Pajak tersebut juga tidak mengetahui adanya dua otoritas pemungutan pajak. Dengan demikian, diharapkan dalam perubahan yang akan datang, dilakukan harmonisasi antara kedua Undang-undang tadi.

Kata kunci : Pembukuan, Undang-undang, PDRD, KUP

PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PENGELOLAAN PAJAK

Masyarakat awam pada umumnya telah memahami bahwa sebagai warga Negara mereka harus membayar pajak kepada pemerintah atau negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, belum semuanya paham bahwa pengumpulan pajak oleh pemerintah berdasarkan kewenangannya, terbagi menjadi pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintahan Kota/Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi. Sementara pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat kewenangannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Saidi, 2011:32). Kekurangpahaman mengenai kewenangan pemungutan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat salah satunya tercermin ketika pertanyaan-pertanyaan mengenai pajak daerah seringkali dilontarkan pada saat sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh DJP. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan

Perkotaan (sektor P2) saat ini sudah tidak ditangani oleh DJP mulai 1 Januari 2014 (Ketentuan Penutup UU PDRD), tetapi dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, idealnya, terdapat kesesuaian aturan antara pajak pusat dan daerah untuk hal-hal yang serupa. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan membahas pembukuan sebagai salah satu ketentuan yang diatur baik dalam Undang-undang yang memungut pajak pusat maupun daerah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penulis membandingkan salah satu peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya dalam hal ini adalah pembukuan dalam UU PDRD dan UU KUP. Hasil pembahasan ini akan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pajak pusat dan daerah yang akan datang khususnya mengenai pembukuan.

PAJAK- PAJAK PUSAT DAN PAJAK- PAJAK DAERAH

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa "Pajak dan

pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Untuk pajak daerah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam Pasal 2 UU PDRD dijelaskan mengenai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam

daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat terdiri dari: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun ketentuan formal pajak pusat diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

KETENTUAN PEMBUKUAN

Baik UU KUP (Pasal 1 angka1) maupun UU PDRD (Pasal 1 angka 10) memiliki definisi yang sama mengenai pajak yaitu sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula dengan pengertian pembukuan. Pada pasal 1 angka 63 Undang-undang PDRD dan Pasal 1 angka 29 Undang-undang KUP mengemukakan hal yang sama mengenai pengertian pembukuan yaitu sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Meskipun keduanya mendefinisikan pembukuan dengan sama, namun selanjutnya kedua Undang-undang tersebut mengatur berbeda mengenai pembukuan.

Dalam Bab XII tentang Pembukuan dan Pemeriksaan Undang-undang PDRD, Pasal 169 ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang PDRD, Wajib Pajak dengan omzet di bawah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta

Rupiah) tidak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan baru wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak apabila sudah memiliki omzet mulai Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Adapun Undang-undang KUP mengatur pembukuan dalam Bab VI mengenai Pembukuan dan Pemeriksaan menyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya di Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Pasal 14 (2) Undang-undang PPh adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan syarat bahwa Wajib Pajak memberitahukan akan melakukan pencatatan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Dari tabel perbandingan di atas terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan atau pencatatan menurut Undang-undang PDRD dan Undang-undang KUP. Perbedaan yang paling signifikan adalah terdapat Wajib Pajak yang menurut Undang-undang PDRD tidak wajib pembukuan atau pencatatan sedangkan dalam Undang-undang KUP seluruh Wajib Pajak kalau tidak wajib pembukuan, pasti wajib pencatatan.

Kondisi di atas membawa beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah sendiri. Contoh :

PT A adalah Wajib Pajak Badan dalam bidang restoran dengan omzet Rp200.000.000,-. Berdasarkan UU PDRD karena omzetnya masih di bawah Rp300.000.000, maka tidak wajib pembukuan atau pencatatan. Namun berdasarkan UU KUP, karena merupakan Wajib Pajak Badan maka wajib menyelenggarakan pembukuan. Dari contoh tersebut, timbul beberapa implikasi. Pertama, Ketentuan dalam Undang-undang PDRD mengenai Wajib Pajak tertentu yang tidak wajib pembukuan atau pencatatan menjadi tidak dapat dijalankan apabila Wajib Pajak juga merupakan Wajib Pajak Pusat. Hal ini tentu akan membuat bingung masyarakat yang tidak paham mengenai adanya dua pemungut pajak yaitu pemungutan pajak oleh pemerintah pusat dan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. Kedua, bagi masyarakat yang sudah paham mengenai hal tersebut akan dapat melihat bahwa masih kurangnya koordinasi di antara para pihak yang terkait dalam pemerintahan. Ketiga, pemanfaatan data pajak di antara pemerintah pusat dan daerah sulit untuk optimal karena perbedaan ketentuan mengenai Wajib Pajak yang wajib pembukuan atau pencatatan.

Perlu dirumuskan kembali aturan mengenai pembukuan untuk pajak pusat dan pajak daerah yang merupakan hasil koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian selanjutnya diharapkan terdapat harmonisasi kebijakan pembukuan untuk pajak pusat dan pajak daerah. Dalam perumusan tersebut juga harus dipertimbangkan mengenai kesulitan masyarakat dalam melakukan pembukuan. Penentuan batasan jumlah omzet bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan haruslah tepat. Maksudnya, kewajiban pembukuan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang dengan keadaan omzet tersebut akan cukup mampu membiayai pengeluaran untuk memperkerjakan penyelenggaraan pembukuan apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan sendiri. Akan lebih baik lagi apabila pemerintah juga dapat menyediakan *software* untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan Laporan Keuangan.

EDUKASI PEMBUKUAN

Menyelenggara pembukuan bukanlah hal yang mudah. Dalam penyelenggaraan pembukuan, Wajib Pajak harus membuat Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Pembuatan Laporan Keuangan tersebut memerlukan pendidikan

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Pembukuan/Pencatatan berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Pajak Pusat

No	WP yang wajib menurut Pajak Daerah	WP yang wajib menurut Pajak Pusat
1.	Tidak ada perbedaan antara yang wajib pembukuan dan wajib pencatatan, WP dapat memilih pembukuan atau pencatatan	Dibedakan antara yang wajib pembukuan dan wajib pencatatan
2	Tidak dibedakan antara Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam kewajiban melaksanakan pembukuan atau pencatatan	Wajib Pembukuan : seluruh WP Badan dan sebagian OP usaha Wajib Pencatatan: sebagian WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP OP tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3	Yang wajib pembukuan atau pencatatan adalah Wajib Pajak (Badan maupun Orang Pribadi) dengan omzet mulai Rp300 juta	Yang wajib pembukuan adalah seluruh WP badan dengan omzet berapapun dan WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan omzet mulai Rp4.800.000.000,00. Yang wajib pencatatan adalah semua WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00.
4	Wajib Pajak dengan omzet kurang dari Rp.300 juta tidak wajib pembukuan atau pencatatan	Tidak ada WP yang tidak wajib pembukuan atau pencatatan.

khusus yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena perlu antisipasi dari Pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai pembukuan kepada Wajib Pajak yang belum memiliki dan memerlukan pengetahuan mengenai pembukuan. Edukasi yang diberikan harus dapat memastikan bahwa Wajib Pajak yang wajib pembukuan dapat menyelenggarakan pembukuan dengan benar. Dengan pembukuan yang benar, maka Wajib Pajak juga dapat dengan mudah menghitung pajak yang terutang dengan tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menjalankan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak dengan benar.

KESIMPULAN

Meskipun pajak daerah dan pajak pusat mendefinisikan pajak dan pembukuan sama, akan tetapi kebijakan pembukuan lebih lanjut yaitu mengenai penentuan omzet bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan atau pencatatan dalam pajak daerah dan pajak pusat saat ini belum terdapat keharmonisan. Akibatnya terdapat beberapa dampak yang

kurang menguntungkan bagi Wajib Pajak terutama yaitu adanya kebijakan mengenai pembukuan pada pajak daerah yang tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perumusan kembali ketentuan mengenai pembukuan yang selaras antara pajak daerah dan pajak pusat. Mengingat kemampuan melakukan pembukuan yang mengharuskan pembuatan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi bukan hal yang mudah dan tidak dimiliki oleh semua Wajib Pajak, maka akan lebih bijak apabila pemerintah juga menyelenggarakan edukasi mengenai pembukuan kepada Wajib Pajak yang memerlukan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-undang Republik Indonesia Nomor

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Tatiana, Novianka Dewi. 2012. Perbandingan Peraturan Perkawinan Mengenai Akibat Hukum Terjadinya Perkawinan Pada Umumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Women's Charter (Amendment) Act No. 2 Of 2011 Dan Administration of Muslim Law Act,

Saidi, Djafar. 2011. Pembaruan Hukum Pajak. 2011. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

RAHMAT NUGROHO
PRANATA KOMPUTER BPPK

DUPLICATE VERSUS EXTEND

KETEPATAN MEMILIH MODE TAYANG PRESENTASI PADA MICROSOFT POWERPOINT

ABSTRAK

Microsoft PowerPoint merupakan salah satu media aplikasi yang digunakan untuk presentasi. Ada empat mode tayang yang dapat kita gunakan pada saat presentasi, diantaranya adalah mode PC Screen Only, Duplicate, Extend dan Second Screen Only. Dari ke empat mode tersebut, hanya dua mode saja yang akan dibahas yaitu mode duplicate dan mode extend. Mode duplicate merupakan setelan default mode tayang yang akan terpilih ketika komputer terhubung dengan LCD proyektor. Hal tersebut mengakibatkan tidak tereksplorenya mode-mode yang lain dimana notabene sebagian besar orang tidak mengetahuinya. Sehingga pada praktiknya, mode duplicate lebih sering digunakan untuk menampilkan presentasi dibanding mode extend. Kedua mode ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat kita gunakan untuk men-deliver sebuah presentasi. Kelebihan dan kekurangan ini tergantung dari sifat materi pada presentasi. Sifat materi ini berhubungan erat dengan ketepatan kita dalam memilih mode tayang. Sebelum pemilihan mode tayang, setidaknya keterampilan menggunakan mode tayang sudah kita kuasai sebelumnya. Karena salah satu tujuan akhir sebuah presentasi adalah audiens menerima dan mengikuti maksud dan tujuan seorang presenter.

Kata kunci: Duplicate, Extend, Presentasi, Presenter, PowerPoint

PENDAHULUAN

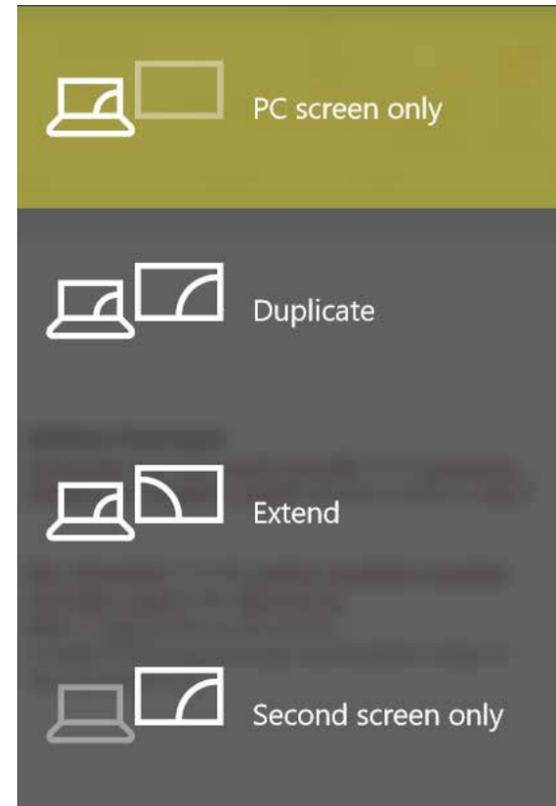
Presentasi secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh si pembuat pendapat atau ide. Seorang presenter pastinya ingin presentasinya ter-deliver dengan baik dan dapat dipahami oleh para audiens. Salah satu media aplikasi yang digunakan oleh presenter dalam menyampaikan presentasinya yaitu aplikasi *Microsoft PowerPoint*. Selain media

aplikasi, tentu diperlukan sarana dan prasarana atau alat pendukung lainnya yang menjadi bagian penting dalam sebuah presentasi. Alat pendukung yang umum digunakan adalah LCD proyektor, perangkat *sound*, dan pointer.

IDENTIFIKASI

Berbicara mengenai LCD proyektor, sistem operasi menyediakan empat mode pilihan

tayang yang dapat kita gunakan. Pemilihan empat mode tersebut terjadi ketika sebuah laptop/komputer terhubung dengan sebuah LCD proyektor. Mode-mode tayang yang dapat kita pilih diantaranya adalah mode *PC only*, *Duplicate*, *Extend* dan *Projector/Second screen only*. *Shortcut* yang dapat kita gunakan untuk menampilkan pemilihan mode tayang ini yaitu dengan menekan tombol logo windows dan huruf P pada keyboard ( + ). Pembahasan lebih lanjut mengenai empat mode



Gambar 1. Pemilihan Empat Mode Tayang
(Sumber Gambar: Koleksi pribadi)

tayang dapat dilihat pada artikel *Kurang Paham Terhadap Mode Tampilan Proyektor LCD di Majalah Edukasi Keuangan Edisi 33/16*.

Artikel ini akan membahas dua dari empat mode tersebut, yaitu mode *duplicate* dan *extend*. Kedua mode tersebut memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Namun pada praktiknya, seorang pegawai cenderung akan memilih mode *duplicate* dibanding mode *extend* ketika presentasi akan ditayangkan. Padahal ada beberapa kelebihan dari mode *extend* yang dapat dimanfaatkan agar presentasi menjadi lebih baik lagi.

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENULISAN

Kecenderungan penggunaan mode *duplicate* dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya

yaitu kurangnya optimalisasi fitur-fitur yang tersedia pada *PowerPoint* dan keterampilan dalam penggunaan mode tayang ketika terhubung dengan LCD proyektor. Dua hal tersebut umum terjadi di lingkungan kerja kita, dimana setiap presentasi lebih sering menggunakan mode *duplicate* dibanding mode *extend*. Salah satu tujuan dari penulisan ini adalah untuk membandingkan penggunaan dari mode *extend* dan *duplicate*, sehingga mode yang dipilih merupakan mode yang tepat dalam men-deliver presentasi yang akan diberikan.

PEMBAHASAN

Presentasi secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam kegiatan penyampaian pendapat, topik atau informasi di hadapan orang banyak. Laswell (dalam Tommy Suprpto, 2009) menjelaskan definisi komunikasi sebagai proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa dan kepada siapa dengan efek apa.

Dari pengertian tersebut ada lima komponen penting dalam

- proses komunikasi
1. Siapa (komunitor)
 2. Mengatakan apa (pesan)
 3. Dengan cara apa (media yang digunakan verbal, non verbal, visual)
 4. Kepada siapa (penerima pesan atau audiens)
 5. Dengan efek apa (efek pesan terhadap audiens)

Komunikasi yang sukses akan terjadi apabila seorang komunikator bisa menyampaikan pesan dengan media yang tepat kepada penerima pesan dan hasilnya penerima pesan memahami atau menindaklanjuti pesan yang telah disampaikan. Dalam hal ini, seorang presenter merupakan seorang komunikator yang sudah mempersiapkan pesan yang akan disampaikan melalui media presentasi (*baca *PowerPoint*) dengan tujuan para penerima pesan dapat memahami dan menindaklanjuti pesan-pesan yang dibungkus dalam bentuk



Gambar 2.
Diagram Lima Komponen Komunikasi
(Sumber Gambar: www.ronapresentasi.com)

presentasi. Namun, apa jadinya apabila presentasi yang telah dibuat dengan susah payah menjadi gagal hanya gara-gara salah memilih mode tayang?

MICROSOFT POWERPOINT

Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi *Microsoft Office* yang umum digunakan dalam presentasi. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini cenderung lebih menggunakan pendekatan grafis/visual dengan bentuk *slide* untuk setiap konten yang akan dipresentasikan. Program aplikasi ini dapat dikatakan sederhana, sehingga mudah untuk menggunakan dan mempelajarinya. Perkembangan pembaharuan aplikasi ini juga semakin mempermudah para penggunanya untuk membuat sebuah desain presentasi yang lebih visual lagi. Tak heran jika aplikasi ini yang sering digunakan ketika akan melakukan presentasi.

Sebuah presentasi yang baik pastinya dipersiapkan dengan baik pula. Salah satu persiapan presentasi yang harus dilakukan di antaranya adalah alat pendukung presentasi itu sendiri. Alat pendukung yang biasa digunakan sebagai media penayangan presentasi saat ini adalah proyektor LCD. Penggunaan alat ini dapat dikatakan sederhana, yaitu cukup menghubungkan kabel antara laptop/komputer dengan proyektor LCD. Ketika sebuah laptop pertama kali terhubung dengan proyektor LCD, maka secara otomatis mode tayang *duplicate* yang akan terpilih.

Berbeda halnya apabila sebelumnya mode



Gambar 3. Kesalahan ketik pada slide dengan mode duplicate
(Sumber Gambar: Koleksi pribadi)



Gambar 4. Proses pengeditan pada slide dengan mode duplicate
(Sumber Gambar: Koleksi pribadi)

tayang yang dipilih bukan *duplicate*, maka secara otomatis mode tayang itu yang terhubung ketika laptop tersambung dengan proyektor LCD. Misalnya pengguna menggunakan mode tayang *extend* kemudian men-shutdown komputernya dalam mode tersebut. Sehingga apabila pengguna menyambungkan laptop kembali dengan proyektor LCD, maka mode yang terpakai otomatis adalah mode *extend*.

MODE DUPLICATE

Presentasi menggunakan mode *duplicate* akan menduplikasi tampilan sama persis apa yang ada di layar *desktop*/laptop ke proyektor LCD. Mode *duplicate* juga merupakan mode yang cenderung sering dipilih presenter pada saat akan melakukan presentasi. Salah satu alasan mode ini yang dipilih antara lain adalah karena mode ini merupakan mode setelan *default* yang digunakan oleh sistem operasi.

Penggunaan presentasi menggunakan media *PowerPoint* sebaiknya tidak menggunakan mode *duplicate*. Alasannya adalah apabila ada kesalahan konten pada *slide* yang sedang ditayangkan maka akan berakibat fatal. Fatalnya adalah kita akan direpotkan untuk menyetop (*freeze*) tampilan proyektor LCD untuk perbaikan konten tersebut. Atau kita dapat memperbaiki langsung konten tanpa menyetop terlebih dahulu sehingga yang terjadi adalah audien dapat melihat apa yang kita kerjakan pada saat perbaikan. Kejadian tersebut secara tidak langsung dapat menjadi tolak ukur seseorang dalam mempersiapkan sebuah presentasi yang telah dibuatnya.

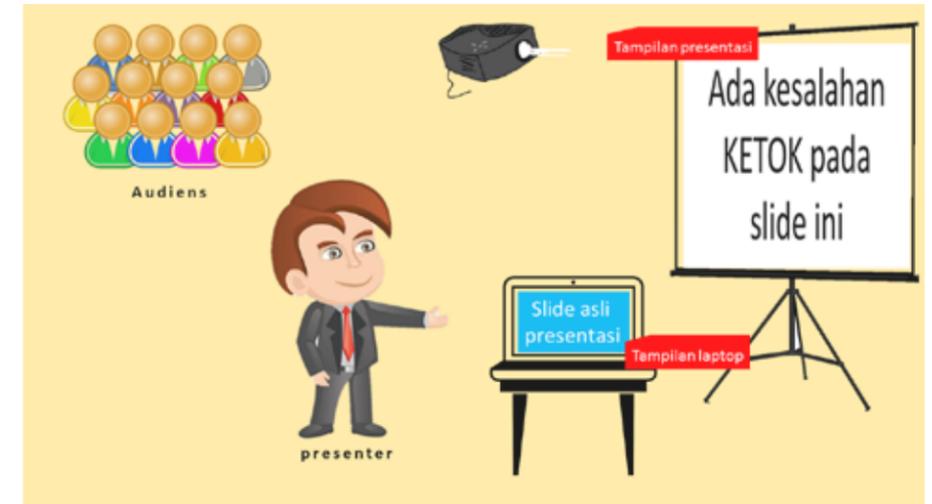
Gambar 3 menunjukkan seorang pegawai sedang presentasi dihadapan para peserta rapat dengan menggunakan mode *duplicate*. Kasusny adalah terjadi kesalahan ketik pada *slide* presentasi yang ditampilkan yaitu tulisan "Ada kesalahan KETOK pada *slide* ini". Tulisan yang benar seharusnya adalah

"Ada kesalahan KETIK pada *slide* ini". Gambar 4 menunjukkan pegawai tersebut sedang memperbaiki *slide* presentasi pada laptop dan tentunya disaksikan pula oleh para peserta rapat. Kejadian seperti itu sebaiknya tidak terjadi apabila pegawai tersebut sebelumnya telah mempersiapkan presentasi yang akan ditampilkan dengan baik dan teliti.

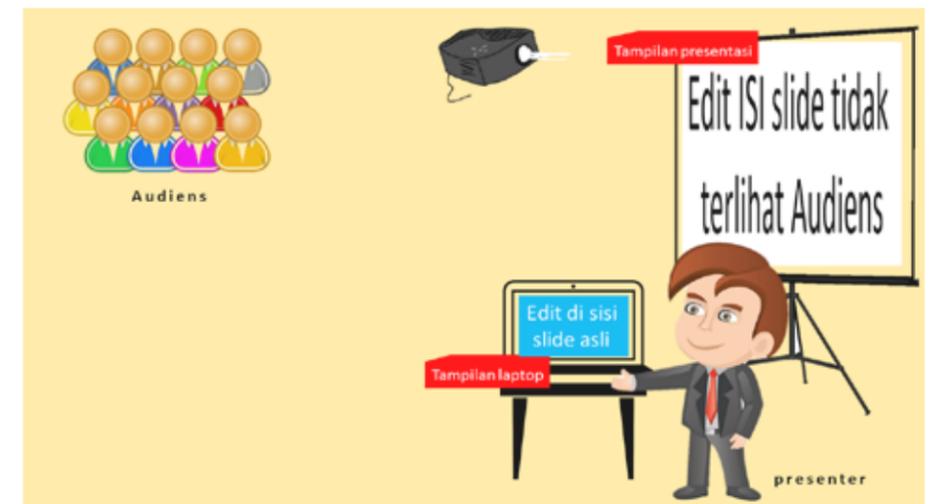
MODE EXTEND

Penggunaan mode *extend* pada saat presentasi akan membuat sistem komputer seolah-olah menyediakan layar baru/kedua yang hampir mirip dengan tampilan yang ada di *desktop*. Perbedaan mendasar yang dapat kita lihat dari kedua tampilan tersebut yaitu pada layar kedua ini tidak terdapat tampilan *file-file* dan/atau *shortcut* seperti tampilan *desktop* pada layar komputer. Untuk mengakses layar kedua ini, kita cukup menggerakkan *cursor mouse* ke arah sebelah kanan layar *desktop* komputer kita.

Presentasi menggunakan media *PowerPoint* sebaiknya menggunakan mode ini (*extend*). Alasannya adalah apabila ada kesalahan konten pada *slide*, kita tidak akan direpotkan dengan masalah yang dialami pada mode *duplicate*. Perbedaan di antara kedua mode ini yaitu mode *extend* akan menampilkan *slide* presentasi asli disisi layar komputer, sedangkan tampilan *slide show* presentasi akan tampil pada layar LCD. Gambar 5 menunjukkan kondisi seorang pegawai mengalami kasus yang sama persis dengan kejadian saat menggunakan mode *duplicate* (Gambar 3). Namun, karena pegawai ini menggunakan mode *extend*, perbaikan kesalahan (Gambar 6) pada *slide* presentasi tidak akan terlihat oleh para peserta rapat. Peserta rapat hanya akan melihat tampilan *slide* yang sudah diperbaiki seakan-akan berubah secara otomatis.



Gambar 5. Kesalahan ketik pada slide dengan mode extend
(Sumber Gambar: Koleksi pribadi)



Gambar 6. Proses pengeditan pada slide dengan mode extend
(Sumber Gambar: Koleksi pribadi)

Tabel 1. Fitur pada Mode Extend dan Duplicate

No.	Extend	Duplicate
1.	Multi Display	One Display
2.	Tidak terlihat saat pengeditan sebuah konten	Terlihat saat pengeditan sebuah konten
3.	Pemilihan slide bersifat dinamis	Pemilihan slide bersifat sequential (berurutan)
4.	Dapat melihat slide selanjutnya	Tidak dapat melihat slide selanjutnya

PENUTUP

Sebaik-baiknya presentasi adalah presentasi yang dipersiapkan dengan matang dan teliti. Dengan demikian, sebelum menayangkan presentasi sebaiknya terlebih dahulu kita memeriksa sifat dari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita dapat leluasa menentukan pemilihan mode tayang yang akan digunakan. Di **Tabel 1** terdapat fitur-fitur dari mode *duplicate* dan *extend* yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan mode tayang dalam presentasi.

Sebaiknya Mode *duplicate* lebih tepat kita gunakan apabila presentasi yang akan ditayangkan bersifat tutorial dan/atau praktik, misalnya tutorial pengisian sebuah aplikasi, praktik penggunaan formula excel dan lain sebagainya. Sedangkan mode *extend* lebih tepat kita gunakan dengan presentasi yang bersifat sebaliknya, misalnya materi *PowerPoint* yang tidak memerlukan praktik langsung dari komputer. Namun, keterampilan dalam

penggunaan mode-mode tayang setidaknya sudah dikuasai terlebih dulu sebelum menjadi seorang presenter.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Rahmat. 2017. *Masalah dan Solusi Komputer Orang Kantoran*. Jakarta : Polimedia Publishing.

<https://www.ronapresentasi.com/pengertian-presentasi-dan-manfaat-presentasi/>, diakses tanggal 23 Februari 2018.

http://presentationsoft.about.com/od/PowerPointtipsandfaqs/f/ppt_overview.htm, diakses tanggal 23 Februari 2018.

<https://support.office.com/en-us/article/View-your-speaker-notes-privately-while-delivering-a-presentation-on-multiple-monitors-ccfa1894-e3ef-4955-9c3a-444d58248093#ID0EAABAAA=2007>, diakses

tanggal 23 Februari 2018.

<https://books.google.co.id/>

6AEIQDAF#v=onepage&q=presenter%20view%20microsoft%20PowerPoint&f=false, diakses tanggal 23 Februari 2018.

<https://support.office.com/en-us/article/View-your-speaker-notes-privately-while-delivering-a-presentation-on-multiple-monitors-ccfa1894-e3ef-4955-9c3a-444d58248093>, diakses tanggal 23 Februari 2018.

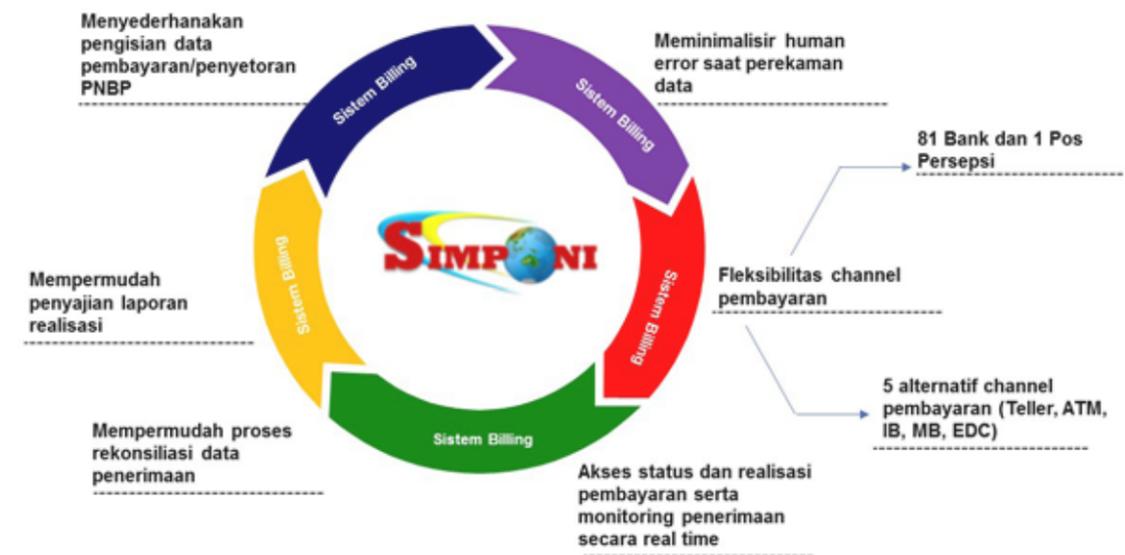
<https://support.office.com/en-us/article/What-is-Presenter-view-98f31265-9630-41a7-a3f1-9b4736928ee3>, diakses tanggal 23 Februari 2018.

REFLEKSI IMPLEMENTASI SIMPONI DALAM PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

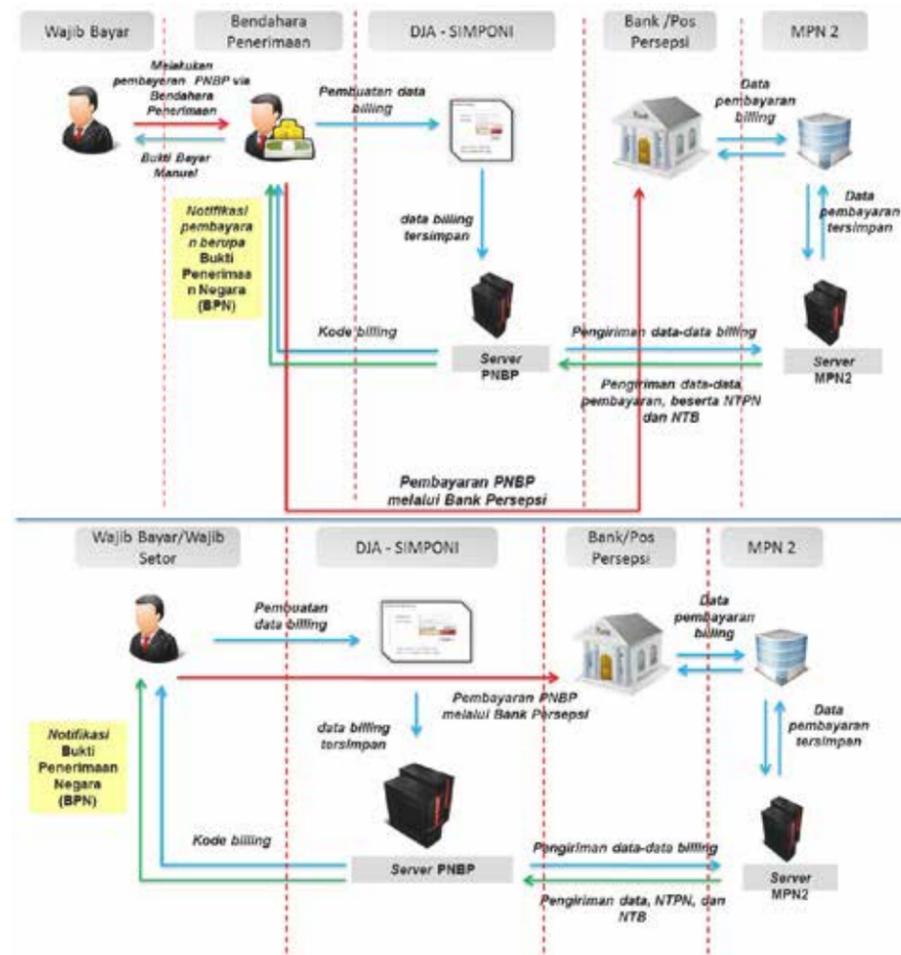
PENDAHULUAN

Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 yang mencapai Rp308,4 Triliun atau 118,5% dari target APBN-P¹ tidak terlepas dari peranan teknologi informasi yang telah memberikan kemudahan dalam pembayaran/penyetoran PNBP ke kas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi informasi memang mendorong adanya perubahan dalam pelayanan yang diberikan pemerintah, termasuk di bidang penerimaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Februari 2014 telah mulai

¹ Dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pnbp-pada-tahun-2017-melewati-target/>, diakses 26 Januari 2018



Gambar 1 Keunggulan SIMPONI dalam Pembayaran/ Penyetoran PNBP
Sumber: Materi Presentasi Direktorat PNB (2017) pada Acara DJA Mendengar 29 Agustus 2017



Gambar 2

Alur Pembayaran/Penyetoran PPNBP ke Kas Negara Melalui SIMPONI

Keterangan: Bagian atas merupakan alur pembayaran/penyetoran PPNBP melalui Bendahara Penerimaan. Bagian bawah merupakan alur pembayaran/penyetoran PPNBP langsung oleh Wajib Bayar

Sumber: Materi Presentasi Direktorat PPNBP (2017) pada Acara DJA Mendengar 29 Agustus 2017

mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (MPN G-2) sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Implementasi MPN G2 ditujukan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran penerimaan ke kas negara melalui penggunaan kode *billing*. Peluncuran MPN G2 tersebut juga dilakukan guna memenuhi harapan masyarakat atas pelayanan penerimaan negara yang mudah, cepat, dan akurat.

Di sektor PPNBP, capaian realisasi yang signifikan di atas turut didorong oleh implementasi sistem informasi yang memadai, yaitu Sistem Informasi PPNBP Online (SIMPONI) yang menjadi bagian dari MPN G2. Aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PPNBP, baik PPNBP sumber daya alam, dividen, maupun PPNBP yang berasal dari layanan Kementerian/Lembaga, serta penerimaan negara lainnya. Dalam Perdirjen Anggaran

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik dijelaskan bahwa Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PPNBP, Sistem *Billing*, dan Sistem Pelaporan PPNBP. Sebagai sistem informasi yang dimiliki dan dikelola Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengembangan SIMPONI telah dilakukan dengan melibatkan dukungan teknis, bantuan, dan kerja sama unit/instansi terkait, antara lain Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pusintek Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga sebagai pengguna utama sistem tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini meliputi:

1. Bagaimana peran SIMPONI dalam memfasilitasi pembayaran/penyetoran PPNBP?
2. Bagaimana perkembangan implementasi SIMPONI?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tulisan ini akan menguraikan mengenai pemanfaatan SIMPONI dalam pembayaran/penyetoran PPNBP dan perkembangan implementasinya, baik dari sisi fitur atau fasilitas yang terdapat pada SIMPONI, perkembangan interkoneksi SIMPONI dengan sistem layanan PPNBP lainnya, maupun perkembangan volume transaksi di SIMPONI.

PEMBAHASAN

Keberadaan aplikasi SIMPONI ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PPNBP. Mekanisme pembayaran/penyetoran ke kas negara dilakukan oleh wajib bayar/wajib setor dengan perekaman data PPNBP melalui *website* SIMPONI di *www.simpone.kemenkeu.go.id* (atau sistem lainnya yang telah terkoneksi dengan SIMPONI). Selanjutnya, perekaman data tersebut akan terkonversi menjadi kode *billing*² yang bisa dibayarkan di 82 Bank/Pos

² Kode *billing* SIMPONI merupakan kode numerik yang terdiri atas 15 digit dengan format “8-4 digit tahun-2 digit bulan-2 digit tanggal pembuatan

Persepsi. Sebagai bukti bahwa pembayaran tersebut berhasil dilakukan, kepada wajib bayar/wajib setor akan diberikan bukti bayar dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Berbeda dengan mekanisme pembayaran PPNBP sebelumnya yang dilakukan dengan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), pembayaran/penyetoran PPNBP melalui SIMPONI menawarkan beragam kelebihan, terutama kesederhanaan dalam perekaman data, fleksibilitas *channel* pembayaran, fasilitas pencetakan Bukti Penerimaan Negara, dan penyajian rekapitulasi data pembayaran secara *real time*. Hal ini akan memudahkan Kementerian/Lembaga dalam menyajikan laporan realisasi PPNBP sehingga pada akhirnya akan mempermudah proses rekonsiliasi data penerimaan.

Pemberlakuan SIMPONI yang telah dirintis sejak tahun 2014 juga terus mengalami perkembangan, baik dari sisi fitur atau fasilitas yang diberikan maupun volume transaksinya. Beberapa fitur atau fasilitas dalam rangka mendukung implementasi sekaligus sebagai keunggulan SIMPONI, antara lain meliputi:

SIMPONI memfasilitasi pencetakan ulang Bukti Penerimaan Negara melalui menu *history billing*. Apabila bukti pembayaran dari *channel* pembayaran rusak/hilang/tidak terbaca, wajib bayar atau Kementerian/Lembaga dapat mencetak ulang bukti penerimaan negara tersebut melalui SIMPONI. Sesuai Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017, Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan SIMPONI memiliki kedudukan yang disamakan dengan surat setoran penerimaan negara.

Layanan pengaduan, keluhan, dan penanganan permasalahan terkait SIMPONI dapat disampaikan melalui menu Manajemen FAQ pada SIMPONI. Seluruh *user* SIMPONI dapat mengakses menu tersebut untuk menyampaikan pertanyaan berupa keluhan, permasalahan, ataupun masukan terkait SIMPONI. Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran juga menyediakan *helpdesk* SIMPONI di Pusat Layanan DJA yang dapat dihubungi baik melalui email, telepon, maupun *on-site*.

User SIMPONI, baik wajib bayar maupun Kementerian/Lembaga dapat memonitor status pembayaran dan realisasi PPNBP

billing-6 digit nomor urut billing, misalnya 820180126123456.



Gambar 3

Kementerian/Lembaga yang Telah Membangun Interkoneksi Sistem dengan SIMPONI

Sumber: Diolah dari Materi Presentasi Direktorat PPNBP (2017) pada Acara DJA Mendengar 29 Agustus 2017

secara *real time*. Kementerian/Lembaga juga diberikan akses sebagai administrator sehingga dapat mengetahui seluruh pembayaran PPNBP yang berada di bawah Kementerian/Lembaga tersebut.

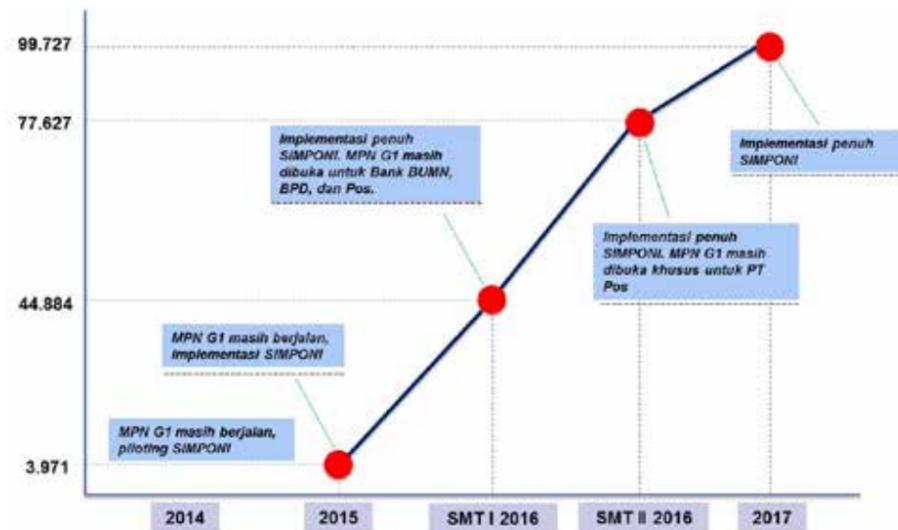
Dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses rekonsiliasi, satker-satker Kementerian/Lembaga diberikan akses untuk dapat melakukan *backup* data SIMPONI sehingga data tersebut dapat dibaca di Sistem Aplikasi Satker (SAS) Ditjen Perbendaharaan.

Pada tahun 2017 juga telah dirilis menu Tarif Favorit pada SIMPONI. Menu tersebut berfungsi untuk lebih memudahkan *user* SIMPONI dalam melakukan perekaman data atas jenis PPNBP yang sering dilakukan pembayaran.

Peran SIMPONI dalam memfasilitasi pembayaran/penyetoran PPNBP secara signifikan juga dirasakan oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini tampak dari munculnya

inisiatif beberapa Kementerian/Lembaga yang telah memiliki sistem layanan PPNBP untuk membangun interkoneksi sistem dengan SIMPONI. Interkoneksi ini dibangun dengan mengintegrasikan sistem pelayanan di Kementerian/Lembaga dengan sistem pembayaran/penyetoran ke kas negara di Kementerian Keuangan sehingga semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan Pemerintah. Berdasarkan data di Direktorat PPNBP, sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 10 Kementerian/Lembaga yang telah membangun interkoneksi sistem dengan SIMPONI.

Perkembangan implementasi SIMPONI selanjutnya juga dapat ditinjau dari volume transaksi yang terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun dari SIMPONI dan *dashboard* MPN G2, rata-rata volume transaksi pada tahun 2015 berada di bawah 4.000 transaksi per hari. Angka ini terus melonjak pada Semester I tahun 2016 menjadi hampir 45.000 transaksi per hari dan sekitar 77.000 transaksi per hari



Gambar 4
Perkembangan Implementasi dan Volume Transaksi SIMPONI per Hari
Sumber: SIMPONI dan Dashboard MPN G2, diakses 12 Januari 2018 (diolah)



Gambar 5
Perkembangan Volume Transaksi SIMPONI TA 2017 Berdasarkan Bulan
Sumber: Dashboard MPN G2, diakses pada 12 Januari 2018 (diolah)

pada Semester II tahun 2016. Pada tahun 2017 volume transaksi terus meningkat menjadi hampir mencapai angka 100.000 transaksi per hari. Hal ini dapat diuraikan lebih lanjut pada Gambar 4.

Apabila volume transaksi tahun 2017 dirinci

berdasarkan bulan, volume transaksi tersebut cenderung fluktuatif. Volume transaksi terbesar terjadi pada November 2017 yang mencapai 2.267.379 transaksi, kemudian berturut-turut Oktober 2017 (2.262.503 transaksi), Agustus 2017 (2.246.329 transaksi), dan Desember 2017 (2.137.347 transaksi).

Walaupun demikian, terlihat jelas bahwa rata-rata volume transaksi per hari cenderung terus meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Berdasarkan data *dashboard* MPN G2 tahun 2017, tercatat ada 6 bulan dengan rata-rata transaksi per hari di atas 100.000, yaitu bulan Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember, dan puncaknya pada Desember 2017 sebesar rata-rata 106.867 transaksi per hari. Hal ini mengindikasikan bahwa volume penyetoran penerimaan negara masih terkonsentrasi pada bulan-bulan akhir tahun anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SIMPONI memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB melalui mekanisme perekaman data guna penerbitan kode *billing*. Berdasarkan kode *billing* inilah selanjutnya dapat dilakukan pembayaran/penyetoran PNPB ke kas negara melalui beragam *channel* pembayaran. Selain itu, peran penting SIMPONI juga tampak melalui berbagai keunggulannya dibandingkan mekanisme pembayaran/penyetoran PNPB sebelumnya yang dilakukan melalui SSBP, antara lain fasilitas pencetakan ulang Bukti Penerimaan Negara dan fasilitas penyajian laporan realisasi penerimaan. Sejak diberlakukan tahun 2014, implementasi SIMPONI juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari penambahan fitur pada SIMPONI, adanya interkoneksi SIMPONI dengan sistem layanan PNPB pada 10 Kementerian/Lembaga, dan volume transaksi yang kini mencapai hampir 100.000 transaksi per hari.

Sebagai sistem utama yang memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB, pengembangan SIMPONI ke depan juga sebaiknya mampu menyajikan data laporan PNPB secara lebih detail dan *customized* sesuai keinginan pengguna, misalnya menyajikan data realisasi PNPB berdasarkan jenis PNPB atau menyajikan data volume layanan PNPB. Selain itu, masih perlu pengujian lebih lanjut atas akurasi data realisasi PNPB yang disajikan melalui SIMPONI. Kedua hal ini akan sangat bermanfaat bagi Direktorat PNPB dalam mengevaluasi kebijakan jenis dan tarif PNPB sehingga penerimaan negara dapat lebih optimal. Di sisi lain, Kementerian/Lembaga juga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas di SIMPONI secara maksimal. Kementerian/Lembaga dapat menggunakan

Tabel 1
10 Tanggal dengan Volume Transaksi Terbesar Tahun 2017

No	Bulan	Tanggal	Volume Transaksi
1	Desember	27-12-2017	133.425
2	Desember	19-12-2017	123.496
3	Desember	21-12-2017	122.986
4	Desember	11-12-2017	122.955
5	Desember	20-12-2017	122.470
6	Desember	22-12-2017	121.527
7	Oktober	11-10-2017	121.053
8	Desember	06-12-2017	120.413
9	Desember	29-12-2017	119.444
10	April	13-04-2017	116.845

Catatan: 8 dari 10 hari dengan volume transaksi terbesar selama tahun 2017 terjadi di bulan Desember

Sumber: Dashboard MPN G2, diakses pada 12 Januari 2018 (diolah)

laporan realisasi PNPB yang dihasilkan dari SIMPONI untuk memudahkan dalam proses rekonsiliasi penerimaan, membantu dalam penelusuran transaksi, dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan PNPB sehingga pengelolaan keuangan negara dapat terus lebih baik.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan instansi tempat penulis bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2016. *Implementasi Terbatas Integrasi MPN G2 Kementerian Keuangan - e-Payment Badan POM pada Pendaftaran Pangan Olahan (Pengumuman HM.02.03.51.10.16.7251)*. Diunduh pada laman <http://www.pom.go.id/new/admin/dat/20161014/itesimponi.pdf>

Direktorat Jenderal Anggaran. 2015. *Semakin Mudah dengan Integrasi SIMPONI-BINFAR*. Diakses pada laman <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1035> tanggal 26 Februari 2018

-----, 2015. *Web Service Rampung, Integrasi SIMPONI-*

BARANTAN Sukses Dilakukan. Diakses pada laman <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1030> tanggal 26 Februari 2018

-----, 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik*. Diunduh pada laman www.anggaran.kemenkeu.go.id

-----, 2017. *Materi Presentasi DJA Mendengar – Untuk Pelayanan SIMPONI yang Lebih Baik*. Disampaikan pada Forum DJA Mendengar 29 Agustus 2017

Kementerian Hukum dan HAM. 2015. *Sosialisasi Layanan AHU Online dan Sistem Pembayaran AHU Online Melalui Simponi (Simpadhu)*. Diakses pada laman <http://djahu.kemenkumham.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1104-sosialisasi-layanan-ahu-online-dan-sistem-pembayaran-ahu-online-melalui-simponi-simpadhu> tanggal 26 Februari 2018

Kementerian Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun*

2017 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. Diunduh pada laman <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/115~PMK.05~2017Per.pdf>

-----, 2018. *PNBP pada Tahun 2017 Melewati Target*. Diakses pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pnbp-pada-tahun-2017-melewati-target/> tanggal 26 Januari 2018

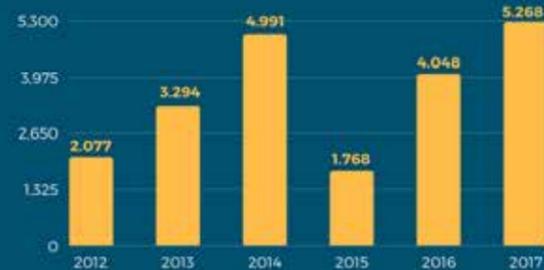
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. *Surat Edaran Nomor SE-11/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2017 tentang Kewajiban Melakukan Pembayaran Melalui SIPNPB yang Telah Terintegrasi dengan SIMPONI*. Diunduh pada laman <http://subditpnpb.menlhk.net/wp-content/uploads/2017/07/SE-11-Tahun-2017-tentang-SI-PNPB-terintegrasi-SIMPONI.pdf>

Konsil Kedokteran Indonesia. 2017. *Surat Edaran tentang Tata Cara Pembayaran Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi dan Sertifikat Kelaikanan Praktik Kedokteran (COGs) Pada Sistem Informasi Registrasi Yang Terintegrasi dengan Sistem Pembayaran Online (SIMPONI)*. Diunduh pada laman <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1286>

INFOGRAFIS LULUSAN PKN STAN

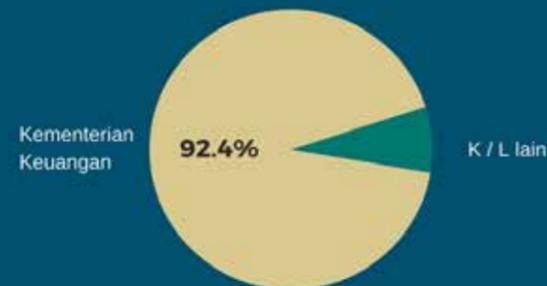
PENYEBARAN LULUSAN PKN STAN TAHUN 2017

LULUSAN PKN STAN TAHUN 2017 DITEMPATKAN TIDAK HANYA DI KEMENTERIAN KEUANGAN MELAINKAN JUGA DI 10 KEMENTERIAN/LEMBAGA NON-KEMENTERIAN LAINNYA



JUMLAH LULUSAN PKN STAN TAHUN 2012 - 2017

PENEMPATAN LULUSAN PER KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NON-KEMENTERIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN	: 4.870
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	: 44
KEMENTERIAN PERTAHANAN	: 5
KEMENTERIAN PPN	: 5
KEMENTERIAN PAN-RB	: 23
KEMENKO PEREKONOMIAN	: 44
KEMENKO KEMARITIMAN	: 7
BADAN EKONOMI KREATIF	: 7
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	: 10
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	: 44
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	: 35

Fakta-Fakta Menarik Sri Mulyani



Masih hangat dalam benak kita kalau pada tanggal 11 Februari 2018 lalu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, dinobatkan sebagai menteri terbaik dunia di sela acara World Government Summit 2018. Dalam acara yang digelar di Dubai, Emirat Arab ini, Ibu Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan yang diserahkan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. Penghargaan menteri terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahun. Penghargaan ini mulai diberikan pada World Government Summit 2016, dan Sri Mulyani Indrawati ini menjadi penerima dan perempuan pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi ini di level Asia.

Di luar berbagai penghargaan yang diterima oleh ibu Sri Mulyani Indrawati, kumpulan fakta di bawah ini mungkin bisa membuat kita semakin bangga dan mengapresiasi kinerja ibu Sri Mulyani Indrawati. Yuk kita intip, apa saja faktanya:

1. Di kalangan orang-orang terdekatnya, bu Sri Mulyani dikenal tidak suka berbasa basi. Bu Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang tegas, perfeksionis, dan tipe orang yang setiap memiliki obsesi dan target, tidak akan mudah menyerah.
2. Di kalangan wartawan, Bu Sri Mulyani Indrawati dikenal *cool* dan percaya diri. “Dia adalah menteri yang artikulasinya bagus banget untuk menjelaskan kebijakan perekonomian yang susah dibantahkan. Dia juga sangat profesional dan bisa menjadi ikon bagi sebuah perekonomian di Indonesia,” tutur Wahyu Muryadi, mantan juru bicara presiden era Gus Dur yang juga menjabat sebagai redaktur eksekutif majalah Tempo.
3. Bu Sri Mulyani Indrawati lebih memilih melanjutkan pendidikannya di jurusan Ekonomi Program Studi Pembangunan (ESP) Universitas Indonesia padahal orang tuanya berharap Sri Mulyani bisa memilih kedokteran atau teknik (Sumber: www.biografiku.com)
4. Bu Sri Mulyani Indrawati sewaktu masih muda ternyata pernah iseng mengamen di jalan dengan 2 kakak laki-lakinya (Mas Nunung dan Mas Nanang) karena keluarganya senang bermusik. (Sumber: Rosi *Talkshow* – Kompas TV).
5. Hingga kini, Bu Sri Mulyani Indrawati masih memikirkan sendiri seluruh busana yang dimilikinya. Namun karena sibuk, beliau menyerahkan kainnya pada penjahit langganannya yang tak

lain adalah kakak iparnya sendiri untuk membuatkan busana sesuai keinginannya. Karena memiliki daya ingat kuat dan gaya menganalisisnya yang cepat, maka ketika beliau melihat sepintasan majalah atau melewati pertokoan, ia langsung menyerapnya dan membuat busana sesuai keinginannya. Terkadang beliau menggantung modelnya dari koran mingguan dan membeli bahan sendiri. (Sumber: rustikaherlambang.com).

6. Bu Sri Mulyani Indrawati mengaku senang apabila ada tokoh masyarakat yang secara sukarela mengungkapkan sendiri kekayaannya, karena akan memudahkan otoritas pajak untuk menelisik laporan pajak yang bersangkutan. (Sumber: kompas.com)
7. Kalau sudah tidak menjadi Menteri Keuangan lagi, Bu Sri Mulyani Indrawati ingin mengabdikan diri di dunia pendidikan. Jika diinginkan untuk mengajar, beliau ingin mengajar di kampus negara sendiri bukan negara lain. Seperti yang dikutip pada saat memberikan kuliah umum di kampus PKN STAN tanggal 17 April 2017.
8. Majalah Keuangan Hong Kong, *Finance Asia*, menobatkan Bu Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan terbaik pada 2017. Penghargaan ini diberikan atas penilaian kerja Bu Sri Mulyani yang dianggap memiliki reputasi bintang dan etos kerja yang gigih. *Finance Asia* juga menggarisbawahi keberhasilan bu Sri Mulyani memperbaiki sistem perpajakan

Indonesia lewat program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. (Sumber: economy.okezone.com)

9. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 Bu Sri Mulyani Indrawati menggagas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang merupakan salah satu program beasiswa unggulan dari pemerintah Indonesia yang memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan tinggi di luar negeri secara gratis.
10. Bu Sri Mulyani Indrawati mendapatkan hadiah spesial dari ketiga anaknya. Hadiah ini terbilang unik karena menjadi bentuk protes sekaligus pengingat baginya yaitu sebuah cangkir putih bertuliskan “Mrs. Always Right” dan beliau selalu memakainya di kantor. Dengan memakainya, ia merasa diingatkan, seperti ketika ia membaca pesan pada souvenir yang sering dijumpai ketika bertugas ke London yang bertuliskan “Don’t worry, you are only fifty”. “Pesan itu adalah pengingat agar hidup kita bahagia,” tutur Bu Sri Mulyani. (Sumber: tempo.com)

REZA ABDILLAH MANURUNG

How to deal with “Mutasi”?

Mutasi adalah hal yang pasti terjadi pada setiap insan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagian besar dari kita akan cenderung “alergi” atau menghindari, karena mutasi membuat kita keluar dari comfort zone.

Di Kementerian Keuangan sendiri, mutasi adalah hal yang sangat lumrah. Sebelum diambil sumpah sebagai ASN, kita sendiri sudah menandatangani surat bermaterai yang berisi kesiapan untuk ditempatkan dimana saja. Jika menolak mutasi, tentunya kita sudah siap akan konsekuensi hukuman disiplin yang akan diterima. Tentunya penolakan tanpa alasan yang jelas juga akan berdampak negatif pada citra diri, dan pada akhirnya mempengaruhi perkembangan karir. Pengalaman setiap orang, perjuangan setiap orang pasti berbeda dalam menjalani kehidupan di lingkungan yang baru. Mau tidak mau, kita akan “terpaksa” secara sukarela untuk menjalani fase ini. Pada tahap awal menghadapi mutasi, seseorang mungkin saja akan mengalami susah tidur dan/atau tidak memiliki selera untuk makan. Namun, sebagian yang lain bisa saja dengan santai menghadapi perintah mutasi yang diterima

Mutasi juga merupakan salah satu mekanisme untuk mengatasi titik jenuh. Seseorang yang selama 5 tahun secara terus-menerus berada dalam lingkungan kerja yang sama pasti akan memiliki rasa jenuh dan bosan. Kondisi ini juga dapat membahayakan organisasi, karena rutinitas yang berjalan dalam waktu yang cukup lama pada akhirnya dapat mengakibatkan organisasi yang jalan di tempat. Mutasi juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru serta dapat menjadikan lingkungan kerja yang lebih sehat. Bahkan dalam konsep *internal control* COSO, rotasi/

mutasi adalah salah satu aktivitas pengendalian internal. Mutasi mungkin akan meningkatkan rasa empati Anda. Anda dapat merasakan hal yang sama bagaimana perasaan teman-teman Anda saat menerima surat keputusan mutasi terlebih dahulu.

Jika Anda dimutasi ke tempat yang Anda impi-impikan selama ini, tentu Anda merasa ingin segera pindah ke tempat baru tersebut. Namun, kita tidak tahu sampai kapan Anda bisa bertahan di tempat favorit Anda tersebut. Atau mungkin tempat yang Anda inginkan selama ini ternyata tidak sesuai dengan harapan Anda. Karena yang Anda inginkan adalah daerah atau kotanya, bukan kantornya. Berikut beberapa tips dalam menjalani kehidupan baru di kantor baru dan lingkungan baru.

MENERIMA KENYATAAN

Ya, ini adalah hal yang pertama harus Anda sadari. Semua akan (p)indah pada waktunya. Menerima kenyataan bahwa Anda baru saja membaca surat keputusan mutasi dan ternyata nama Anda tertera di dalamnya, dan itu adalah kenyataan yang harus diterima. Sangat wajar bila Anda bersedih dan menangis. Menangislah, keluarkan kesedihan Anda. Anda mungkin akan kehilangan kenyamanan yang selama ini Anda rasakan. Namun perlu diingat, ini hanya sementara. Ini adalah satu fase dalam hidup yang membuat Anda menjadi lebih kuat. Tentu ujian akan membuat kita menjadi lebih tangguh jika menghadapinya secara optimis. Anda harus bangkit. Dalam dunia pekerjaan,

tentu kita tidak selalu menerima pekerjaan yang hanya kita inginkan saja, atau hanya bekerja di kantor yang kita inginkan saja. Tentu tidak selamanya kita menjadi oportunist.

BERBAURLAH DENGAN TEMAN-TEMAN BARU

Teman di kantor lama akan Anda anggap sebagai teman terbaik dalam hidup. Tentu ini tidak salah. Mereka telah menjadi keluarga Anda. Anda akan mengingat hal-hal indah bersama teman lama Anda. Karaoke, jalan-jalan, makan siang, atau *ngopi bareng* akan menjadi kenangan yang bisa membuat Anda sedih. Anda mungkin juga akan membanding-

bandingkan rekan kerja baru dengan rekan kerja lama Anda. Namun perlu diingat, tidak selamanya Anda dan teman lama Anda berada dalam kantor yang sama. Mereka juga akan dimutasi pada waktunya. Anda akan menemukan teman baru, jaringan baru yang tentunya akan berdampak positif bagi karir dan kehidupan Anda ke depan. Sampaikan kepada rekan kerja baru Anda untuk mengajak Anda bila mereka akan makan siang bersama. Memiliki teman-teman baru akan membuka cakrawala Anda. Berbaurlah, jika Anda sudah bisa bercanda dan tertawa bersama, kemungkinan Anda sudah mulai melewati sebagian fase sulit dalam adaptasi dengan lingkungan baru. Anda telah menemukan keluarga baru di kantor baru Anda.

TEMUKAN HOBI ANDA DI LINGKUNGAN BARU

Sebagian dari kita mungkin merasa tidak memiliki hobi. Ya, tidak ada salahnya. Bagi yang sudah berkeluarga, biasanya hanya memiliki 2 waktu, yaitu waktu bekerja dan waktu bersama keluarga. Namun, kita bisa menggali lebih dalam lagi apa kegiatan lain yang kita senangi diluar kedua waktu tersebut. Tentunya kegiatan yang positif. Jika Anda hobi berbelanja, pergilah sesekali ke mall. Mungkin hanya *window shopping*, tetapi ini mungkin akan membuat Anda lebih bahagia melihat keramaian. Namun, jangan terlalu sering karena akan berpengaruh pada kondisi keuangan Anda. Jika Anda hobi

memancing, pergilah mencari sungai atau kolam pemancingan. Anda akan menemukan orang-orang yang sehoobi dengan Anda. Jika Anda suka bersepeda, bawalah serta sepeda Anda ikut pindah bersama Anda atau belilah sepeda baru. Bergabunglah dengan komunitas sepeda. Anda juga bisa menjelajah lingkungan tempat tinggal baru Anda dengan bersepeda. Jika Anda suka *travelling*, keluarlah dari kamar Anda dan temukan keindahan alam yang baru. Jika Anda suka berdiskusi keilmuan tentang agama, bisnis ataupun sosial, bergabunglah dengan forum-forum/komunitas keilmuan yang Anda inginkan. Bisa jadi teman kantor Anda memiliki hobi yang sama dengan Anda.

SERAPLAH PENGETAHUAN BARU

Setiap organisasi pasti memiliki gaya bekerja yang berbeda. Begitu juga dengan kantor baru Anda. Apabila ada hal yang berbeda, maka Anda akan langsung membandingkan dengan kantor lama Anda. Anda mungkin akan sering “mengernyitkan dahi”. Anda akan menemukan ritme kerja baru, budaya baru, dan cara

BERCERITALAH KEPADA REKAN ATAU ATASAN DI TEMPAT KERJA BARU

Ceritakan kesulitan Anda. Percaya atau tidak, ketika kita mencurahkan keluh kesah kepada orang lain akan mengurangi beban di pundak kita. Tentunya pilihlah orang yang menurut Anda dapat menjaga amanah. Terkadang, bercerita saja walaupun tanpa solusi juga merupakan hal ampuh untuk mengurangi beban dan kesedihan Anda. Atasan langsung Anda juga merupakan tempat yang tepat untuk berbagi pikiran. Dia akan membagi pengalamannya yang bisa Anda gunakan dalam menghadapi masa sulit. Atasan dan rekan kerja Anda akan sangat senang membantu jika Anda menemukan kesulitan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang memang baru bagi Anda.

TEMUKAN TEMPAT TINGGAL BARU YANG NYAMAN

Pindah tempat kerja ke daerah atau kota lain tentunya mengharuskan kita mencari tempat

kepindahan Anda, namun Anda masih galau dan bersedih, maka pada akhirnya kita semua harus selalu bersyukur dan tetap bersabar. Anda berada jauh dari keluarga hanya untuk sementara. Anda tentu masih bisa bersyukur atas nikmat yang selama ini Anda miliki. Keluarga bahagia, pekerjaan yang bagus, teman-teman yang selalu membantu. Tidak selamanya kita berada di dalam kondisi nyaman kita. Ini merupakan fase pembelajaran dan perjuangan kita. Suatu saat di masa depan, Anda pasti akan bersyukur bahwa Anda pernah dimutasi, semua pasti ada hikmahnya.

Perjuangan setiap orang tentu berbeda dalam menghadapi mutasi. Seseorang yang sangat terbiasa dengan kehidupan ibukota harus menyesuaikan dirinya saat harus dipindahkan ke daerah lain, mungkin ke pulau lain. Seseorang yang dipindahkan ke Jakarta bukan berarti akan lebih bahagia. Dia harus siap menghadapi hiruk pikuk ibukota, seperti kemacetan. Ritme kehidupan pun akan berubah. Seorang anak muda yang masih *single* tentu berbeda perjuangannya dengan seorang ibu yang harus meninggalkan buah hatinya

Terkadang, bercerita saja walaupun tanpa solusi juga merupakan hal ampuh untuk mengurangi beban dan kesedihan Anda.

bekerja yang berbeda dari kantor Anda yang sebelumnya. Bisa jadi akan menyadarkan kita atas kebiasaan yang kurang baik di kantor lama. Bawa dan pertahankan kebiasaan baik di kantor lama Anda. Seraplah ilmu baru di kantor baru Anda. Bidang pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya akan menambah kapasitas diri Anda. Jika sebelumnya Anda berada di ibukota, tentu sekarang Anda akan dapat melihat langsung bagaimana rasanya mewakili Kementerian Keuangan di daerah. Jika Anda sebelumnya tidak berada di kantor pusat, tentu Anda akan memiliki perspektif baru terhadap pekerjaan Anda saat berada di kantor pusat. Anda mungkin saja membawa ide baru bagi kemajuan kantor baru Anda. Inilah saatnya Anda bertumbuh.

tinggal baru. Selain di kantor, kita pastinya menggunakan waktu untuk beristirahat di rumah. Tempat tinggal yang nyaman juga akan membantu proses adaptasi di lingkungan baru. Bertanyalah kepada rekan kerja di kantor baru tentang referensi tempat tinggal. Dengan kemajuan teknologi informasi, Anda juga bisa berselancar di situs-situs *search engine* untuk mencari tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan Anda. Tentunya Anda juga harus mempertimbangkan terkait biayanya.

BERSYUKUR DAN BERSABAR

Jika Anda sudah melakukan semua saran dan nasihat dari orang di sekitar Anda tentang

saat harus mutasi. Bagi yang bisa membawa keluarga ikut pindah bersama, mungkin akan lebih mudah menghadapinya. Karena ada orang-orang terdekat yang berada di sisinya. Seseorang yang sudah beberapa kali dimutasi tentu berbeda dengan seseorang yang baru sekali dimutasi. Perjuangan menuju kantor dengan *speedboat* selama 2 jam tentu akan berbeda dengan perjuangan seseorang yang menuju kantor di dalam KRL pada jam-jam sibuk. Seseorang yang hanya mutasi dalam kota yang sama tentu akan berbeda dengan seseorang yang mutasi ke luar kota.

Pada akhirnya, seperti pepatah, *time heals almost everything.*;)



ARIFIN ROSID

PhD in taxation, alumni School of Taxation & Business Law, UNSW Business School, University of New South Wales, Sydney; penerima beasiswa Program SPIRIT WorldBank – Kemenkeu RI, Batch II.

Make a Strong Start!

Winners see the gain, losers see the pain. Kalimat inilah yang terus terngiang dalam pikiran saya saat melangkah kaki menuju pesawat yang akan membawa saya ke Sydney, Australia. Saat itu bulan puasa, medio Juli 2013, dua minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perasaan senang, sedih, dan was-was bercampur jadi satu. Senang karena akhirnya bisa berangkat kuliah S3 dengan beasiswa, sedih karena harus meninggalkan keluarga dalam kurun waktu yang lama, dan was-was karena menjalani tugas belajar di luar negeri untuk pertama kalinya. Ada banyak pertanyaan muncul dalam otak imajinasi saya: seperti apa nanti kuliahnya? Seperti apa model belajarnya? sesulit apa nanti ujiannya?

Sampai suatu ketika, setelah sekitar satu bulan menempati sebuah ruangan di Quadrangle Building, salah satu bangunan ikonik dari University of New South Wales, saya dijadwalkan rapat untuk pertama kalinya dengan dua pembimbing saya: Profesor Chris Evans dan Profesor Binh Tran-Nam. Karena rapat pertama, agenda utama dari rapat ini adalah perkenalan awal. Saya bertanya kepada diri sendiri: apa yang perlu saya siapkan? Kebetulan saat itu saya teringat sebuah teknik bernama *Johari Window*—disebut Johari karena memang gabungan dari dua nama: Joseph Luft and Harry Ingham. Melalui diagram yang saya beri judul *'my current profile as a research student'*, saya mencoba memberikan gambaran awal diri saya kepada kedua supervisor sebagai mahasiswa yang akan mereka bimbing.

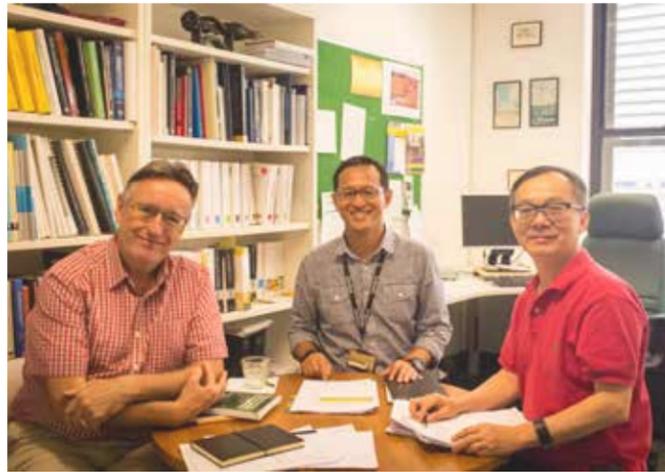
Apa yang saya uraikan dalam matrik Johari Window ini? Ada empat hal: (i) sumberdaya yang ada; (ii) kemampuan saat ini sebagai peneliti; (iii) ketersediaan dan akses terhadap

data; dan (iv) waktu yang bisa dialokasikan untuk kegiatan riset. Saya rinci kelebihan dan kekurangan saya dalam tiap empat aspek tersebut. Dan kemudian saya beri skor. Apa skor terendah saya? Kemampuan awal sebagai peneliti; saya memberinya skor 6.

Selesai menjalani studi, kini saya menyadari dokumen yang saat itu saya buat ternyata sangatlah penting. Setidaknya karena dua alasan. Pertama, dokumen ini secara implisit memberikan tiga pertanyaan penting yang harus saya jawab selama menjalani tugas belajar: *now what; so what; dan what next?* Pertanyaan pertama berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini, pertanyaan kedua berhubungan dengan kondisi yang ingin saya capai di akhir masa tugas belajar saya, dan pertanyaan ketiga berkaitan dengan bagaimana cara mencapainya.

Kedua, saya bisa menyimpulkan, karena esensi dari riset adalah *'a process of discovery'*, menjalani kuliah doktoral harus siap untuk akrab dengan





ketidakpastian. Dan, dokumen yang saya buat tadi membantu saya memetakan ketidakpastian yang ada. Setidaknya ada dua ketidakpastian yang harus diantisipasi: (i) terkait proses dan (ii) terkait hasil atau temuan riset. Pertama, terkait 'proses', ada banyak hal yang akan kita hadapi. Misalnya, ketidakpastian apakah proposal riset kita dianggap layak untuk dilanjutkan, ketidakpastian mengenai apakah studi pustaka kita dan *gap of knowledge* yang kita temukan sudah layak, ketidakpastian mengenai paradigma riset yang akan kita gunakan, ketidakpastian mengenai apakah kita bisa mendapatkan akses data yang sesuai dengan tujuan riset kita, ketidakpastian apakah kita mempunyai kemampuan analisis yang memadai untuk tujuan riset kita. Singkatnya: *your initial idea will not resemble your final product*. Termasuk ketidakpastian apakah kita tetap bisa memelihara semangat kita selama proses riset.

Kedua, terkait hasil riset, kita mungkin saja tidak menemukan apa yang dari awal ingin kita temukan. Hipotesis kita tidak terbukti. Bahkan, saat kita menguji secara empiris sebuah fenomena dan kemudian menyimpulkan adanya temuan riset, karena keterbatasan metode riset kita, masih ada empat kemungkinan yang bisa terjadi dari kesimpulan kita: (i) *true positive*, seperti alarm kebakaran yang berbunyi karena memang terjadi kebakaran; (ii) *false negative*, seperti alarm kebakaran yang tidak berbunyi padahal ada kebakaran yang terjadi; (iii) *false positive*, seperti alarm kebakaran yang berbunyi padahal tidak ada kebakaran yang terjadi; atau (iv) *true negative*, alarm kebakaran yang tidak berbunyi karena memang tidak ada kebakaran yang terjadi. Idealnya tentu saja hasil yang pertama dan keempat yang ingin kita peroleh, tapi kemungkinan skenario kedua dan ketiga dapat terjadi tidak dapat kita hindari.

Itulah mengapa, seandainya saya ditanya sebuah pertanyaan biner, manakah yang lebih penting antara kecerdasan (*intelligence*) dan ketangguhan (*resilience*) ketika menjadi mahasiswa doktoral, tanpa ragu jawaban saya adalah yang kedua: ketangguhan. Kecerdasan jelas memang diperlukan, tapi ketangguhan akan membantu kita untuk terus bisa bertahan untuk akrab dengan ketidakpastian sampai dengan tujuan riset selesai. Dan ini membuat saya teringat satu kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh teman baik saya dulu: *doing a PhD does not make you smarter, it makes you wiser*. Dan, ada satu pepatah yang menurut saya juga tepat untuk menggambarkan hal ini: *pain makes you stronger; fear makes you braver; heartbreak makes you wiser*. Dan ini sedikit banyak berkaitan dengan hikmah yang bisa kita ambil.

"Kecerdasan jelas memang diperlukan, tapi ketangguhan akan membantu kita untuk terus bisa bertahan untuk akrab dengan ketidakpastian sampai dengan tujuan riset selesai."

Apa hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari adanya dua ketidakpastian dalam riset tadi? Hikmahnya, dengan mendalami secara langsung proses riset, kita akan memahami dua hal penting: (i) bagaimana 'ilmu pengetahuan' dimaknai dan diciptakan—setidaknya dari mempelajari aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi; dan (ii) bagaimana kemampuan berpikir kritis kita diuji dan diasah—setidaknya dari mempelajari struktur dan prosedur desain riset sekaligus proses pengumpulan dan analisis data. Manfaatnya, di satu sisi, dua pemahaman tadi sepertinya tidak hanya berguna dalam dunia akademis dan dunia kerja saja, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita—khususnya di era sekarang dimana informasi berlimpah ruah, yang tak jarang membuat kita kesulitan membedakan antara 'opini' dan 'fakta', antara '*believed fact*' dan '*checked fact*'. Di sisi yang lain, dengan semakin banyak yang kita pelajari, kita semakin sadar bahwa yang kita pelajari sejatinya tidak lebih dari seujung tetes air dari samudra ilmu pengetahuan yang dalam dan luas (*the more I know, the more I don't know paradox*). Kesadaran yang seharusnya bisa mengarahkan kita jalan menuju kebijaksanaan.

Intinya, jika ingin lancar, untuk melanjutkan kuliah doktoral kita membutuhkan persiapan

awal yang benar-benar matang. Tentu tidak ada konsensus mengenai definisi 'lancar' dalam menjalani kuliah S3. Setiap perjalanan adalah unik bagi setiap orang yang menjalaninya. Apakah kuliah saya bisa dibilang lancar? Alhamdulillah, dengan kerja keras dan doa orang-orang tercinta, Tuhan memberikan kelancaran dalam kuliah saya. Indikasinya sederhana. Setidaknya, selain selesai tepat waktu, artikel tentang riset saya mendapat penghargaan '*Best PhD Research Paper*' dalam 28th ATTA Conference 2016. Juga, selain mendapat nilai skor tertinggi, disertasi saya juga dinobatkan sebagai '*one of the most careful and clearly presented PhD theses I have ever seen*' oleh salah satu penguji eksternal, Profesor Richard M. Bird, begawan pajak dari University of Toronto, Kanada.

Terakhir, seandainya saya diminta memberi saran untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan kuliah S3 dalam sebuah kalimat, jawaban saya adalah sederhana, apapun bentuknya, '*make a strong start!*' Lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, sedini mungkin. Mungkin tidak mudah, tapi ini bisa dilakukan. Dan, ini yang terpenting, melakukan yang terbaik adalah pada hakikatnya adalah salah satu bentuk rasa syukur kita.

AGUS SUHARSONO

Sinta Trilaksita

Suci Trilaksita juga sandang nama baiknya, suci menahan diri dari sentuhan Rahwana meski raga terkurung tiga belas tahun di taman Alengka. Tepat di samping peraduan Rahwana yang selalu menginginkannya.

Trilaksita maksudnya menyatunya tiga unsur hidup manusia yaitu: ucapan, pikiran, dan hati. Semua manusia punya ketiganya, namun tidak semua dapat menyatukannya, kadang apa yang diucapkan bukan olah pikir dan suara hati, sebatas keinginan belaka. Kadang suara hati dan pikir, meski benar, tidak mampu terucap karena kelu lidah. Beda dengan Dewi Sinta Trilaksita, apa yang ada di pikir dan di hati, itulah yang terucap, apa yang diucapkan

adalah isi hati dan pikirnya. Namun, suatu saat nanti ucapan Dewi Sinta harus diuji dengan api, kesendirian dalam buangan tidak hanya sekali. Menyatunya yang tiga terbukti menahan panasnya api. Namun ucapannya juga yang membuat ia ditelan bumi, sebagai akhir hidupnya.

Kisah ini tidak lepas dari ambisi Rahwana sang perkasa dan sakti tiada tara. Penguasaan ilmunya setara dengan Dewa. Bahkan Rahwana leluasa keluar masuk di Khayangan, tempat semayam para dewa dan bidadari. Saat di khayangan itulah mata Rahwana terpana, hatinya terpesona, tak beralih pandang dari diri Dewi Widowati, bidadari tercantik di

Taman Khayangan. Hasratnya tak terbendung, kakinya berayun memasuki Taman Khayangan dimana para bidadari sedang bercengkerama. Selangkah menapak, secepat kilat pintu taman tertutup, bergegas Rahwana menarik kakinya mundur. Sayang tangan kanannya tak terselamatkan, pintu taman itu menjepit lengannya. Sekuat kesaktian Rahwana menyelamatkan tangannya, lepas, namun tulangnya remuk tak kan pulih, pepes. Sejak saat itulah Rahwa tak dapat mengerakkan tangan kanannya, semua kegiatan dilakukan dengan tangan kiri. Mungkin bukan harfiah, hanya sebuah isyarat bahwa Rahwana tak mampu lagi berbuat baik dengan tangan kanannya.

Kegemaran Rahwana mengembara memperluas taklukan atau mencari kesaktian tidak surut oleh waktu, juga saat Dewi Tari, permaisurinya, hamil. Di Khayangan para dewa memberi tugas Dewi Widowati untuk memberi kesuburan dan memelihara kehidupan di bumi. Kehendak alam, Dewi Widowati menitis pada janin yang ada dalam kandungan Dewi Tari. Saat kelahiran tiba, Rahwana masih di pengembaraan. Para tetua di Alengka sadar apa yang akan terjadi, Rahwana tak mungkin mampu menahan keinginan mengawini Dewi Widowati meski sudah nitis di janin permaisurinya. Demikian juga Gunawan Wibisana, bisa menebak nafsu kakakandanya.

Bayi itu lahir, seperti dugaan, perempuan berparas cantik, betullah jikalau titisan Dewi Widowati. Sigap Gunawan Wibisana mengambil keputusan, menciptakan bayi laki-laki dari awan yang nantinya sangat sakti mandraguna, Megananda alias Indrajit. Bayi perempuan itu segera dimasukkan dalam kotak dan diangkut ke sungai.

Prabu Janaka penguasa Kerajaan Mantili, sudah lama menginginkan keturunan, namun tak kunjung datang. Suatu saat, Prabu Janaka sedang mengadakan sedekah bumi, bersyukur atas limpahan kekayaan dan hasil bumi yang melimpah. Prabu Janaka membajak tanah sebagai bagian tata upacara sedekah bumi. Tanpa diduga ujung bajaknya mengenai sesuatu yang keras, ternyata sebuah kotak, setelah dibuka berisi bayi berparas cantik. Sebagai petanda, bayi itu diberi nama Sinta yang diambil dari sebutan ujung bajak. Begitulah, Dewi Sinta akhirnya menjadi anak Prabu Janaka. Kisah yang lain menceritakan bahwa Dewi Sinta, ditemukan Prabu Janaka terbungkus dalam ketupat Sinta, maka dinamakan Dewi Sinta.

Masa kecil Dewi Sinta sangatlah bahagia, dalam lindungan sang Prabu Janaka, penuh kasih sayang dari ibundanya dan segenap dayang-dayang. Sebelum nantinya, ujian hidup datang silih berganti, dimulai saat ia dipinang satria gagah perkasa, sakti mandraguna lagi rupawan, Ramawijaya.

Prabu Janaka menginginkan laki-laki yang mempersunting Dewi Sinta adalah satria pinilih. Sebagai langkah seleksi diadakan sayembara, barang siapa yang mampu mengangkat busur panah pusaka Kerajaan Mantili akan dinikahkan dengan Dewi Sinta. Puluhan pangeran dan kesatria mencobanya, busur itu tak bergeming. Giliran Raden Ramawijaya, tangan kanannya dengan ringan mengangkat busur, tangan kirinya menarik talinya sekuat kesaktiannya. Busur itu teregang penuh, menimbulkan daya magis luar biasa bagi yang menyaksikannya. Angin seolah berhenti bertiup, juga sinar matahari. Mungkin Dewa Bayu dan Dewa Surya ikut tertegun melihat kesaktian yang tiada tara tersebut.

Otot lengan Ramawijaya menegang, meregang busur sakti itu. Peluh bercucuran gemerlap ditimpa sinar surya. Saat semua terdiam, hati kecil Ramawijaya terbersit menarik lebih kuat busur itu. Krakkk, busur itu patah jadi dua, semua yang menyaksikan bertempik sorak. Bukannya gusar hari Prabu Janaka karena pusaka kerajaan patah jadi dua. Sebaliknya, hatinya girang melihat calon menantunya, melebihi apa yang ia inginkan. Demikianlah, Dewi Sinta akhirnya dipersunting Ramawijaya, putra mahkota Ayodya.

Perkawinan dua insan yang sangat mempesona, mempelai laki-laki bagai dewa, mempelai perempuan bagai bidadari. Namun perkawinan itulah awal penderitaan Dewi Sinta. Memang Ramawijaya adalah putra permaisuri yang berhak menjadi putra mahkota menggantikan ayahandanya kelak. Namun, Raja Desarata terikat janji pada Dewi Kekayi, istri ketiganya, bahwa Kerajaan Ayodya akan diberikan kepada anak Dewi Kekayi, Barata. Bukan hanya itu saja, Dewi Kekayi juga minta Ramawijaya dan istrinya dibuang ke hutan Dandaka selama tiga belas tahun. Prabu Desarata meninggal di singgasana tengelam dalam kesedihan.

Ujian pertama, Dewi Sinta harus hidup di hutan Dandaka yang belantara sebagai warga buangan. Kenyataan yang diterima dengan lapang, cinta dan setia pada Ramawijaya. Ucapan dan anggukan kepala saat Prabu Janaka

menikahkannya dengan Ramawijaya bukan hanya dalam bahagia dan suka, namun juga derita dan nestapa.

Keputusan Prabu Desarata yang tak kuasa menampik permintaan Dewi Kekayi membuat tentangan dari rakyat dan kerabat. Juga Barata putra Dewi Kekayi pun tak terima dan tak sudi duduk di singgasana bukan haknya. Ramawijaya bersikukuh patuh keputusan Prabu Desarata, pertama karena menghormati ayahandanya, kedua itulah jalan kesatria.

Hari yang ditentukan tiba, Ramawijaya mengajak Dewi Sinta meninggalkan istana Ayodya menuju hutan Dandaka. Laksmana adiknya beda ibu menyertainya. Rombongan itu kian lama kian bertambah, beberapa rakyat ikut menyertai perjalanan ke hutan Dandaka dalam diam.

Di tepi hutan, Ramawijaya menghentikan langkah, meminta rakyat kembali ke rumah. Mereka melangkah dalam lara, sambil senandungan doa untuk keselamatan pangerannya. Sebagaimana adat yang berlaku, sebagai buangan, Ramawijaya, Dewi Sinta dan Laksmana harus menanggalkan baju kebesaran. Cukuplah kain dari kulit kayu sebagai pelindung raganya. Namun, semua itu tak meredupkan cahaya kecantikan Dewi Sinta.

Barata hanya mampu melihat semua itu, tak mampu berbuat sesuatupun. Juga saat semua pakaian kebesaran kakak-kakaknya diserahkan kepadanya, ia hanya mematung. Barata bersikeras ingin menemani kakaknya di pembuangan, Ramawijaya tidak mengizinkan karena harus ada yang memimpin Ayodya. Hati Barata leleh saat menyaksikan ketiga kakaknya melangkah masuk hutan Dandaka dengan pakaian dan persediaan seadanya. Lunglai langkahnya menuju istana. Sebagai penghormatan kepada Ramawijaya yang berhak atas singgasana, ia taruh dua terompak Ramawijaya di singgasana. Barata duduk di sebuah singgasana yang berada di samping singgasana utama.

Dewi Sinta tak merasakan derita di pembuangan, semua ia terima dengan lapang hati. Keluasan hati itu yang membuat derita menjadi kecil. Keluasan hati yang penuh dengan kasih dan sayang, menutupi kesengsaraan. Mungkin inilah kasih sayang yang sebenarnya dan patut dipahami selain valentine.



Kisah ini tidak semua orang tahu, mungkin juga tidak semua orang setuju. Dewi Sinta, selain sangat cantik, juga istri yang sangat setia, tentang ini mungkin semua orang sudah tahu.

EKO SUPRIYONO

Reverse PivotTable

di Microsoft Excel

Kemampuan dalam menganalisis data dengan cepat dapat membantu Anda membuat keputusan bisnis dengan lebih baik. Namun terkadang sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai, terutama jika memiliki data dalam jumlah besar. *PivotTable* merupakan cara yang mudah untuk meringkas, menganalisis, menjelajahi, dan menyajikan data, serta dapat dibuat hanya dengan beberapa klik. *PivotTable* sangat fleksibel dan dapat dengan cepat disesuaikan, tergantung pada keinginan dalam menampilkan hasil. Anda juga dapat membuat *PivotChart* berdasarkan *PivotTable* yang akan diperbarui secara otomatis ketika *PivotTable* diperbarui.

Sebagian besar orang mungkin sudah biasa menggunakan pivot table dalam menganalisis data. Namun tidak jarang kita justru membutuhkan sebaliknya, kita diberi satu risalah data berbentuk tabel yang kita ingin ubah menjadi data berbentuk daftar/baris seperti ilustrasi pada Gambar 1. Kita bisa memilih setiap kolom secara manual untuk kemudian kita bentuk sebuah kumpulan data baru berbentuk tabel baris namun membutuhkan waktu yang lama. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil seperti itu secara lebih cepat dengan menggunakan *Microsoft Excel 2016*. Untuk kasus ini telah kami siapkan contoh kasus yang bisa diunduh pada link bit.ly/latihexcel.

Kemampuan dalam menganalisis data dengan cepat dapat membantu Anda membuat keputusan bisnis dengan lebih baik. Namun terkadang sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai, terutama jika memiliki data dalam jumlah besar. *PivotTable* merupakan cara yang mudah untuk meringkas, menganalisis, menjelajahi, dan menyajikan data, serta dapat dibuat hanya dengan beberapa klik. *PivotTable* sangat fleksibel dan dapat dengan cepat disesuaikan, tergantung pada keinginan dalam menampilkan hasil. Anda juga dapat membuat *PivotChart* berdasarkan *PivotTable* yang akan diperbarui secara otomatis ketika *PivotTable* diperbarui.

Sebagian besar orang mungkin sudah biasa menggunakan pivot table dalam menganalisis data. Namun tidak jarang kita justru membutuhkan sebaliknya, kita diberi satu

risalah data berbentuk tabel yang kita ingin ubah menjadi data berbentuk daftar/baris seperti ilustrasi pada Gambar 1. Kita bisa memilih setiap kolom secara manual untuk kemudian kita bentuk sebuah kumpulan data baru berbentuk tabel baris namun membutuhkan waktu yang lama.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Account Name	2017	2016	2015	2014	2013	2012
2	Total revenue	70256	55288	39334	28185	22040	17234
3	Cost of revenue total	52866	42881	30545	21824	17130	13445
4	Selling, general and admin. expenses, total	11181	7893	5056	3519	2781	2197
5	Depreciation/amortization	0	0	0	0	0	0
6	Unusual expense(income)	0	0	0	0	0	0
7	Other operating expenses, total	182	177	121	117	-27	6
8	Total operating expense	69479	54297	37717	26887	21072	16514

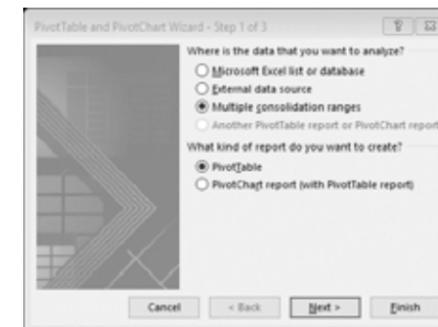
	A	B	C
1	Row	Column	Value
2	Accounts payable	2012	2650
3	Accounts payable	2013	4133
4	Accounts payable	2014	6445
5	Accounts payable	2015	9258
6	Accounts payable	2016	12816
7	Accounts payable	2017	15315
8	Accrued expenses	2012	749

Gambar 1. Konversi Data Tabel ke Data Baris

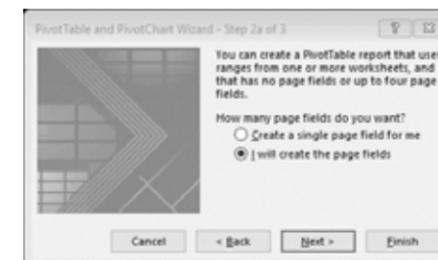
Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil seperti itu secara lebih cepat dengan menggunakan *Microsoft Excel 2016*. Untuk kasus ini telah kami siapkan contoh kasus yang bisa diunduh pada link bit.ly/latihexcel.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

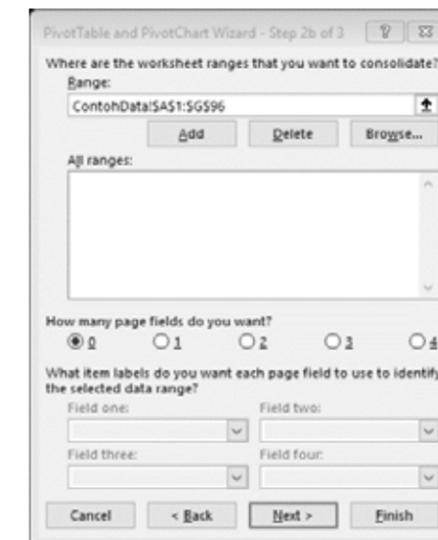
1. Tekan Alt + D + P secara bergantian untuk memanggil *PivotTable and PivotChart Wizard*. Kemudian pilih "Create a Multiple Consolidation Ranges" dan pilih lanjutkan (*Next*).



2. Di langkah selanjutnya pilih "I will create the page fields."



3. Pilih rentang (*range*) data yang akan di konversi dan pilih 0 pada *page fields* yang akan dipakai, setelah itu klik Selesai (*Finish*).



4. Setelah langkah 1 s.d. 3 kita lakukan, *excel* akan membuat sebuah *PivotTable* sesuai dengan data asli kita.

17234	22040	28185	39334	55288	70256	232337
0	0	0	0	0	0	0
19	19	19	19	20	27	123
-690	-690	-690	-690	-1008	-2112	-5880
0	0	0	14	11	12	37
0	0	0	0	0	0	0
100577	142048	203791	276955	373198	476672	1573281

Klik dua kali pada *cell* yang berada di pojok kanan bawah (perpotongan *grand total* baris dan *grand total* kolom).

Maka data anda yang sebelumnya hanya berbentuk tabel akan ditambah dengan tabel berbentuk daftar/baris sama dengan ilustrasi pada Gambar 1.

Pada beberapa kasus ada kemungkinan terkendala *shortcut* yang tidak bekerja pada langkah pertama. Jika hal tersebut terjadi, kita dapat menambahkan pilihan *PivotTable and PivotChart Wizard* secara manual pada menu *Customize Ribbon (File-Options-Customize Ribbon)*.

Cara Merawat Gigi dan Mulut Agar Tetap Sehat

Perawatan gigi dan rongga mulut bukan hanya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan anggota tubuh ini, tetapi juga agar penampilan Anda tetap terjaga. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan merawat gigi dan mulut secara teratur dan dengan cara yang benar.

Senyum adalah ekspresi tubuh dengan menarik sudut bibir ke arah samping dan menampakkan gigi. Tentu tidak akan menarik dan terlihat indah jika Anda memperlihatkan gigi yang tidak bersih karena jarang dirawat. Belum lagi, nafas yang Anda keluarkan justru mengeluarkan bau tidak segar. Tips merawat gigi dan mulut merupakan cara ampuh untuk memancarkan senyum sehat yang dapat

menarik perhatian orang lain. Tidak perlu perawatan mahal untuk memancarkan senyum indah Anda, cukup lakukan beberapa tips sederhana berikut ini.

1 Menggosok gigi 2 kali sehari, sesudah sarapan dan sebelum tidur. Sikat seluruh bagian gigi dengan cara yang benar sesuai bagian masing-masing. Ganti sikat gigi Anda bila bulu sikat sudah mekar/rusak



2 Gunakan dental-floss (benang gigi) bila diperlukan untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak mudah dijangkau.

3 Hindari penggunaan tusuk gigi untuk membuang sisa makanan. Sebab, bisa melukai gusi dan mengakibatkan gusi bengkak.

4

Kurangi konsumsi makanan manis, lengket, dan asam. Segeralah berkumur sesudah makan makanan tersebut. Gula adalah penyebab utama pembusukan gigi dan jika bergabung dengan plak, bakteri *Streptococcus mutans* akan menghasilkan asam yang mempercepat pembentukan lubang gigi (karies).



5

Perbanyak makanan berserat dan berair



8

Biasakan menggunakan kedua sisi rahang saat mengunyah sehingga tercipta beban seimbang untuk kesehatan dan kekuatan sendi rahang.

6

Merawat email gigi dengan suplemen fluoride hanya efektif hingga usia 11 tahun. Selanjutnya gunakan pasta gigi berfluorida. Karena selain dapat memperkuat, gigi akan terlihat lebih putih bersih.



9

Hindari kebiasaan buruk seperti mengunyah makanan keras (es batu, permen keras), menggigit pulpen, berkeletuk saat emosi atau tidur. Hal ini akan merusak struktur gigi.

7

Membersihkan lidah dengan cara disikat perlahan setelah selesai gosok gigi dapat menjaga nafas segar lebih lama.

10

Kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk perawatan maksimal. Bila Anda pernah mencabut gigi, tambal gigi Anda atau gunakan gigi palsu untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Tips gigi sehat dengan perawatan sederhana di atas bertujuan untuk menjaga kesehatan, kekuatan serta kebersihan mulut dan gigi sehingga dapat memancarkan senyum indah Anda.

Dermaga Sungai Tangga Buntung:

PALEMBANG ADALAH SUNGAI MUSI



FOTO : JENI WARDIN

JENI WARDIN

Jika anda berkunjung ke kota Palembang, cobalah menaiki perahu wisata yang banyak disewakan di tepian sungai di daerah Benteng Kuto Besak.

Dengan biaya sewa bervariasi

(Rp50.000,- hingga Rp200.000,-) anda dapat menaiki perahu berukuran kecil selama 15 menit hingga satu jam ke hulu dan ke hilir sungai, atau ke Pulau Kemarau, salah satu dari banyak delta yang terbentuk dari endapan material yang terbawa arus sungai selama ratusan tahun. Jika anda berwisata dengan rombongan yang cukup besar, sewalah perahu bertingkat berukuran sedang.

Sekilas hiburan ini mungkin hanya menawarkan sensasi berkendara di sungai terpanjang di Sumatera. Dahulu, sungai berair keruh yang debitnya terakumulasi sepanjang 750 km dan berhulu di punggung bukit Barisan, jauh di Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ini menjadi urat nadi transportasi di Kota Palembang. Mau tidak

mau, pikiran kita akan dibuat melayang ke masa-masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya: kerajaan Buddha yang menjadi poros perdagangan maritim di Asia dan Asia Tenggara. Sejarah inilah yang membuat berperahu di Sungai Musi menjadi sesuatu yang tidak biasa: pada dasarnya anda sedang menjalani napak tilas perniagaan masa lampau. Dan melalui perniagaan semacam inilah Kota Palembang dilahirkan.

Sebagai dataran yang sebagian besarnya lahannya adalah rawa-rawa, hingga awal masa kemerdekaan, jalan konvensional merupakan kemewahan bagi masyarakat kota Palembang. Jikapun ada, kualitasnya tidaklah memungkinkan untuk aktifitas pengangkutan barang dengan skala besar. Di tengah situasi semacam ini, masyarakat menggantungkan kehidupannya pada aliran sungai yang membelah kota. Kantong-kantong pemukiman dihubungkan oleh dermaga-dermaga yang jumlah puluhan hingga ratusan. Keramaian dengan intensitas tertinggi terbentuk di daerah sekitar Benteng Kuto Besak sekarang.

Satu dari sedikit dermaga sungai yang masih melayani kebutuhan sampan untuk bersandar, satu di antaranya adalah Dermaga Sungai Tangga Buntung. Objek budaya inilah yang akan dapat anda nikmati jika berperahu ke hulu sungai dari Dermaga Kuto Besak. Memandangnya dari tengah sungai ke sisi utara, imajinasi kita akan terbawa jauh ke masa-masa kejayaan pasar terapung. Masa-masa ketika kehidupan masyarakat didikte oleh debit dan arah aliran sungai.

Ya, Sungai Musi dahulu kala (hingga dua dekade yang lalu) memang tidak selalu mengalir dari hulu ke hilir. Di masa ketika dasarnya lebih dalam dibanding saat ini, di waktu air laut pasang, permukaannya akan lebih tinggi dibanding permukaan sungai di daerah kota Palembang, dan arus sungai akan berbalik. Membawa serta ikan-ikan jenis tertentu ke anak sungai dan kanal-kanal di tengah kota. Hal inilah mungkin yang

menjadikan pasangan kata hulu dan hilir menjadi rancu di percakapan sehari-hari masyarakat Palembang, hingga tak pelak hulu dan hilir digunakan untuk menandai daerah di sisi selatan dan utara aliran sungai, alih-alih sebagai penanda daerah asal dan tujuan aliran sungai.

Di sekitar Dermaga Sungai Tangga Buntung bisa kita dapati pemukiman penduduk beserta gang-gang yang dibangun di tepi sungai. Penghuninya adalah para nelayan yang kesehariannya memang mencari ikan. Pola pemukiman seperti ini dulu masih sering dijumpai. Dan penghuninya tidak terbatas hanya pada mereka yang menggantungkan diri pada aktifitas perikanan.

Dermaga Sungai Tangga Buntung saat ini, bagi sebagian besar warga Palembang layak jadi penanda, yang bersuara terkadang lantang, walau di banyak kesempatan hanya berbisik:

identitas Palembang adalah Sungai Musi. Bukan kepadatan yang makin menyusahkan. Bukan kriminalitas yang terkadang terlalu dibumbui. Bukan hawa panas dan kabut asap. Kota Palembang adalah Sungai Musi.

FOTO OLEH BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN

Medan

Jika Anda berkesempatan mengikuti pelatihan di BDK Medan, sayang sekali jika Anda tidak berkeliling kota mengunjungi berbagai spot menarik. Lewat deretan foto berikut, teman-teman kami di BDK Medan mencoba merangkum beberapa alternatif lokasi yang sayang untuk Anda lewatkan, kalau-kalau Anda masih bingung akan kemana



ISTANA MAIMUN

Istana Maimun adalah istana Kesultanan Deli yang merupakan salah satu ikon kota Medan, Sumatera Utara, terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Didesain oleh arsitek Italia dan dibangun oleh Sultan Deli, Sultan Mahmud Al Rasyid.



GEREJA MARIA ANNAI VELANGKANNI

Dibangun di dekat kompleks perumahan Sakura Indah, Tanjung selamat, Medan, Sumatera Utara. Nama Annai Velangkanni diambil dari bahasa India. Annai yang berarti bunda dan Velangkanni adalah desa di mana Bunda Maria menampakkan diri. Penampakan ini menjadi latar belakang dibangunnya gereja Katolik berarsitektur Mogul, ciri khas kuil-kuil di India. Gereja ini menyimpan banyak keajaiban seperti mata air yang ditemukan di bawah patung Bunda Maria segera setelah peletakan batu pertama.

MASJID RAYA

Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al Mashun dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi delapan dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara dan barat. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah kehebatan Suku Melayu sang pemilik dari Kesultanan Deli (Kota Medan).



KUIL SHRI MARIAMMAN

Kuil Shri Mariamman adalah kuil Hindu tertua di Kota Medan. Kuil ini dibangun pada tahun 1881 untuk memuja dewi Mariamman. Kuil ini sering dipenuhi umat Hindu saat festival Deepawali dan Thaipusam.



MAHA VIHARA MAITREYA

Maha Vihara Maitreya adalah salah satu vihara terbesar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, Maitreya, Vihara ini memang sangat kental dengan ajaran Buddha Maitreya yang mengajarkan cinta kasih semesta. Maha Vihara Maitreya terbuka untuk umum dan biayanya gratis

RUMAH TJONG A FIE

Rumah ini merupakan bangunan yang didesain dengan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, Melayu dan art-deco dan menjadi objek wisata bersejarah di Medan. Tjong A Fie adalah seorang pengusaha, bankir dan kapitan yang berasal dari Tiongkok dan sukses membangun bisnis besar dalam bidang perkebunan di Sumatera, Indonesia.



"RAHMAT" INTERNATIONAL WILDLIFE MUSEUM & GALLERY

"RAHMAT" *International Wildlife Museum & Gallery* adalah satu-satunya di Asia yang memiliki koleksi ± 2000 species yang sudah diawetkan dari berbagai negara mulai dari yang kecil hingga yang terbesar sesuai dengan habitatnya.



"Masalah dan Solusi Komputer Orang Kantoran" merupakan buku yang berisi troubleshooting jika terjadi masalah dalam pengoperasian komputer di saat bekerja.

ARDES M. Y. STG

Masalah dan Solusi Komputer Orang Kantoran

PENGARANG : RAHMAT NUGROHO
PENERBIT : POLIMEDIA PUBLISHING
JUMLAH HALAMAN : 188
TAHUN TERBIT : 2017

Buku ini terdiri dari 5 (lima) bagian buku yang tersusun dari pembahasan tentang masalah *operating system*, *software*, *hardware* dan *peripheral device* dan jaringan. Bagian pertama bercerita tentang *operating system* yang di dalamnya membahas permasalahan jika ada data yang terhapus dan bagaimana mengembalikan data tersebut. Cara mengambil *screenshot* dalam komputer menjadi bagian kedua yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan cara melihat *serial number* laptop dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di komputer dan langkah-langkah yang bisa dilakukan jika data dari *USB flash drives* yang Anda miliki hilang.

Bagian kedua secara khusus membahas tentang *software*. Aplikasi yang dibahas adalah aplikasi yang sangat populer dan tidak bisa lepas dari dunia kerja kita saat ini, yaitu pengolah kata (*Microsoft Word*), data (*Microsoft Excel*) dan presentasi (*Microsoft Power Point*). Mengatasi *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel* yang ngehang, serta *Microsoft Power Point* yang tidak bisa memanggil data dari *flash drives* menjadi bagian selanjutnya dari buku ini. Selain itu, permasalahan saat presentasi yang tidak tampil di komputer kita juga disampaikan. Bagian terakhir dari bagian dua adalah cara untuk mengetahui *password* yang kita simpan di browser seperti *Google Chrome* ataupun *Mozilla Firefox*.

Masalah komputer yang tiba-tiba mati menjadi pembuka di bagian tiga. Dilanjutkan dengan cara yang bisa dilakukan jika komputer dinyalakan dan berbunyi "beep beep" dan tampilan layar yang tidak muncul/hitam. Sedangkan bagian keempat khusus membahas berbagai penyakit *printer*, koneksi ke LCD proyektor dan *print server*. Terakhir, buku

ini membahas masalah pada jaringan, baik masalah internet, *folder sharing* serta *printer sharing*.

Komputer merupakan alat yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, terutama di dunia perkantoran yang suatu saat pasti akan menemukan kendala-kendala. Buku ini berusaha memecahkan masalah tersebut dengan memilih kendala-kendala yang umum terjadi dan menyediakan pemecahan masalah dengan baik. Terkait data *USB flash drives* yang hilang misalnya, ternyata bisa dikembalikan dengan cara yang sederhana tanpa bantuan *software* apapun. Kemudian cara mengatasi *Microsoft Excel* yang selalu hang jika membuka *file* menjadi satu solusi yang baru penulis ketahui. Kemudian, cara *sharing printer* yang dibahas dan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan, akan sangat bermanfaat dalam pemilihan ataupun pengaturan *printer* yang digunakan dalam kantor.

Penyampaian dalam buku "Masalah dan Solusi Komputer Orang Kantoran" menjadi poin yang perlu menjadi perhatian. Biasanya, buku tentang permasalahan komputer disampaikan secara teknis, sistematika yang kaku, dan bahasa yang digunakan cukup menyulitkan untuk pengguna awam. Berbeda dengan buku ini, permasalahan dan pemecahan dijabarkan dengan bahasa yang sederhana, berbentuk dialog, dan petunjuk yang jelas sehingga untuk pengguna awam dan kurang paham komputer, buku ini bisa menjadi petunjuk yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Jika diikuti dengan benar, maka buku ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan komputer Anda, baik di kantor maupun di rumah.

KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



CALL FOR PAPERS 2018

JURNAL BPPK

ISSN 2085-3785



Submit karya ilmiah Anda tentang ekonomi / keuangan negara ke:
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk>

FREE OF CHARGE

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja



 klc.kemenkeu.go.id
KEMENKEU LEARNING CENTER

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008